



**ANALISIS KECENDERUNGAN *FRAUD* DI PEMERINTAH DESA
DENGAN PENDEKATAN *FRAUD TRIANGLE*
(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh :

Arin Diah Nawang Palupi

140810301092

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**ANALISIS KECENDERUNGAN *FRAUD* DI PEMERINTAH DESA
DENGAN PENDEKATAN *FRAUD TRIANGLE*
(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi dan memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi

Oleh :

Arin Diah Nawang Palupi

140810301092

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya menyembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pengetahuan, dan kesabaran. Terimakasih atas ridho dan kehendak-Mu lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Orang tua yang saya sayangi Wuwuh Herti Ardiningsih yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
3. Kakak kandung saya Galuh Herdya Ardini;
4. Bapak Taufik dan Ibu Andriana yang telah membimbing saya dalam membuat skripsi ini;
5. Para dosen yang telah memberikan ilmunya;
6. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi
7. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan ingat kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al Insiroh: 6-8)

Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka mengubah nasib mereka sendiri.

(QS Ar-Ra'dd:11)

Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah adalah kemenangan yang hakiki.

(Mahatma Ghandi)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arin Diah Nawang Palupi

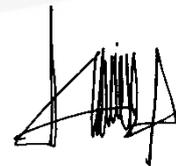
NIM : 140810301092

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul “ANALISIS KECENDERUNGAN *FRAUD* DI PEMERINTAH DESA DENGAN PENDEKATAN *FRAUD TRIANGLE* (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Agustus 2017

Yang menyatakan,



Arin Diah Nawang Palupi

NIM. 140810301092

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Kecenderungan *Fraud* di Pemerintah
Desa dengan Pendekatan *Fraud Triangle* (Studi
Empiris pada Pemerintah Desa Kabupaten
Banyuwangi)

Nama Mahasiswa : Arin Diah Nawang Palupi

NIM : 140810301092

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I,



Taufik Kurohman, SE., M.SA., Ak, CA.

NIP. 198207232005011002

Pembimbing II,



Andriana, SE., M.Sc, Ak, CA.

NIP.198209292010122002

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi



Dr. Agung Budi Sulistiyo SE, M.Si, Ak, CA.

NIP. 197809272001121002

SKRIPSI

**ANALISIS KECENDERUNGAN *FRAUD* DI PEMERINTAH DESA
DENGAN PENDEKATAN *FRAUD TRIANGLE*
(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi)**

Oleh:

Arin Diah Nawang Palupi

NIM. 140810301092

Pebimbing:

Dosen Pembimbing I : Taufik Kurohman, SE., M.SA., Ak, CA

Dosen Pembimbing II : Andriana, SE., M.Sc, Ak, CA

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS KECENDERUNGAN *FRAUD* DI PEMERINTAH DESA DENGAN
PENDEKATAN *FRAUD TRIANGLE***

(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arin Diah Nawang Palupi

NIM : 140810301092

Jurusan : S-1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

08 Januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Wasito, M.Si., Ak., CA

NIP. 19600103 199103 1001

Sekretaris : Dr. Ahmad Roziq, SE., MM., Ak., CA

NIP. 19700428 199702 1001

Anggota : Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak., CA

NIP. 19550227 198403 1001

(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember,

Dekan,

Miqdad
Dr. Muhammad Miqdad., SE., MM., Ak., CA

NIP. 197107271995121001

Arin Diah Nawang Palupi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Kecurangan merupakan tindakan memanfaatkan pihak lain demi keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh pendekatan teori *Fraud Triangle* terhadap kecenderungan kecurangan di pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kabupaten Banyuwangi tepatnya seluruh desa yang berada di Kecamatan Cluring. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari metode regresi linier berganda, uji kelayakan model (Uji F), koefisien determinasi, dan Uji Parsial (Uji T). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum dan Perilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa. Sedangkan Kesesuaian Kompensasi, Gaya Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa.

Kata Kunci: Kecurangan (*fraud*) di pemerintah desa, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), penegakan hukum, komitmen organisasi, perilaku tidak etis.

Arin Diah Nawang Palupi

Accounting Department, Faculty Of Economic and Business, Jember University

ABSTRACT

Fraud is an act of taking advantage from the others for personal gain. The study aims to provide an overview of influence of Fraud Triangle Theory on fraud trends in village GOVERNMENT level. This research was conducted on the village GOVERNMENT level in Banyuwangi precisely the whole village in Cluring District. Data collection techniques that used in this study is the primary data by questionnaires. Method of data analysis uses Descriptive Statistics, Data Quality Test, Classical Assumption Test, and Hypothesis Testing consisted of multiple linear regression method, model feasibility test (F test), coefficient of determination, and Partial Test (T test). The results showed that Law Enforcement and Unethical Behavior influenced the tendency of fraud in the village GOVERNMENT level. While Compensation Suitability, Leadership Style, GOVERNMENT Internal Control System, and Organizational Commitment have no effect on fraud tendency in village GOVERNMENT sector.

Keywords: fraud in village GOVERNMENT, compensation suitability, leadership style, GOVERNMENT internal control system, law enforcement, organizational commitment, unethical behavior.

RINGKASAN

ANALISIS KECENDERUNGAN *FRAUD* DI PEMERINTAH DESA DENGAN PENDEKATAN *FRAUD TRIANGLE* (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi). Arin Diah Nawang Palupi; 140810301092; halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Fraud merupakan sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur keuangan yang disengaja. Kecurangan tersebut meliputi tipu daya, mengelabui, dan kelicikan sehingga pihak lain bisa ditipu atau dicurangi. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori *Fraud Triangle*, dimana teori tersebut terdiri dari tiga faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) yaitu tekanan/*pressure*, kesempatan/*opportunity*, dan pembenaran/*rationalization*.

Pressure adalah tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*. Tekanan yang sering menjadi penyebab terjadinya kecurangan adalah tekanan akan kebutuhan ekonomi. *Opportunity* merupakan faktor yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Biasanya peluang terjadi karena pengawasan atau kontrol internal yang lemah dan adanya penyalahgunaan wewenang. *Rationalization* merupakan faktor dari *Fraud Triangle* yang paling sulit diukur karena rasionalisasi dapat membuat seseorang berfikir jika perbuatan mereka benar dan hal ini dapat menciptakan berbagai tindakan kecurangan terjadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proksi dari ketiga faktor tersebut yaitu kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan hukum, komitmen organisasi, dan perilaku tidak etis.

Korupsi merupakan salah satu bentuk *fraud* yang paling sering terjadi. Di sektor pemerintahan sendiri, korupsi telah terjadi dimana-mana dan telah melekat baik di pemerintah pusat maupun daerah. Menurut data yang dilansir oleh *Transparency International*, Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37. Sedangkan menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menyatakan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 1,45 Triliun dengan nilai suap Rp 31 Miliar dan pada tahun 2016, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dengan kerugian negara mencapai Rp 223,5 Miliar.

Kecurangan tidak hanya terjadi di pemerintah pusat saja. Pemerintah desa menjadi tolak ukur pertama dalam kemajuan suatu negara. Meningkatnya jumlah dana desa yang mencapai Rp 1 miliar selain dapat memajukan suatu desa juga bisa menimbulkan kecurangan-kecurangan akibat penyalahgunaan dana desa tersebut. Berbagai kasus kecurangan dalam pemerintahan desa telah banyak terjadi seperti yang terjadi pada Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang, Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan, Desa Glagah Arum Kecamatan Porong, Desa Oma Maluku tengah, dan Pamekasan Madura yang menyalahgunakan anggaran dana desa dan APBdes. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dan

dikendalikan melalui struktur dan sistem sehingga penggunaan dana dapat digunakan untuk masyarakat desa.

Penelitian ini ditujukan kepada pemerintahan desa khususnya Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi tentang terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan desa dengan menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang aktif dalam seluruh kegiatan pemerintahan, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, dan bekerja yang bertempat di kantor balai desa.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu perangkat desa dari seluruh desa di Kecamatan Cluring antara lain Desa Plampangrejo, Desa Sarimulyo, Desa Tampo, Desa Sraten, Desa Kaliploso, Desa Sembulung, Desa Tamanagung, Desa Cluring, dan Desa Benculuk. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa. Sedangkan kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS KECENDERUNGAN *FRAUD* DI PEMERINTAH DESA DENGAN PENDEKATAN *FRAUD TRIANGLE* (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pengetahuan, dan kesabaran. Terima kasih atas ridho dan kehendak-Mu lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Indah Purnamawati, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Taufik Kurohman, SE, M.SA, Ak, CA dan Andriana, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
7. Dosen Akuntansi yang telah memberikan pemahaman mengenai akuntansi;
8. Ibu kandungku mama Wuwuh Herti Ardiningsih yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat, dorongan moral, nasehat, serta fasilitas serta doa-doa terbaik untuk kesuksesan peneliti;

9. Kakak saya yang saya sayangi Galuh Herdya Ardini yang selalu memberikan doa yang tulus;
10. Pacar sekaligus sahabat saya Lucky Ferdy Irawan yang telah membagikan ilmu dan memberikan semangat agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
11. Mas Dian yang selalu membantu saya dalam melakukan penelitian
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Scherryo Agung, Dini Rosa Aprilia, Dini Eka Permatasari yang selalu menemani dan membagikan ilmu;
13. Sahabat SMA hingga kuliah yang selalu ada dan mendengarkan curhatan tentang skripsi saya Rizki Bayu Prasetyo, Rysya Firdha Febriani, Kurnia Juana Dwi Putri, dan Septy Dwi Artanti;
14. Keluarga KKN UMD 46 Tahun 2017/2018
15. Semua pihak yang membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 13 Desember 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN BIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Audit	12
2.1.2 Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	14

2.1.3 <i>Fraud Triangle Theory</i>	15
2.1.4 Klasifikasi Kecurangan (<i>Fraud</i>)	20
2.1.5 Pemerintahan Desa.....	22
2.1.6 <i>Fraud</i> dalam Sektor Pemerintahan Desa	22
2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kecenderungan	
Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	24
2.2.1 Kesesuaian Kompensasi.....	25
2.2.2 Gaya Kepemimpinan	26
2.2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	27
2.2.4 Penegakan Hukum	28
2.2.5 Komitmen Organisasi	28
2.2.6 Perilaku Tidak Etis.....	29
2.3 Penelitian Terdahulu	30
2.4 Pengembangan Hipotesis	36
2.5 Kerangka Konseptual Penelitian	42
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	43
3.3 Populasi dan Sampel	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.5 Metode Pengumpulan Data	44
3.6 Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel.....	45
3.6.1 Variabel Dependen.....	45
3.6.2 Variabel Independen	46
3.7 Analisis Data	49

3.7.1 Statistik Deskriptif	49
3.7.2 Uji Kualitas Data.....	49
3.7.2.1 Uji Validitas.....	50
3.7.2.2 Uji Reliabilitas.....	50
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.7.3.1 Uji Normalitas	50
3.7.3.2 Uji Multikolinieritas	51
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas	52
3.7.4 Uji Regresi Linier Berganda	52
3.7.4.1 Uji F.....	53
3.7.4.2 Uji Koefisien Determinasi	53
3.7.4.3 Uji T.....	53
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	55
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum	56
4.2 Analisis Deskriptif	56
4.2.1 Deskriptif Responden.....	56
4.2.1 Statistik Deskriptif	59
4.3 Uji Kualitas Data	61
4.3.1 Uji Validitas	61
4.3.2 Uji Reliabilitas	62
4.4 Uji Asumsi Klasik	63
4.4.1 Uji Normalitas.....	63
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	66
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	67

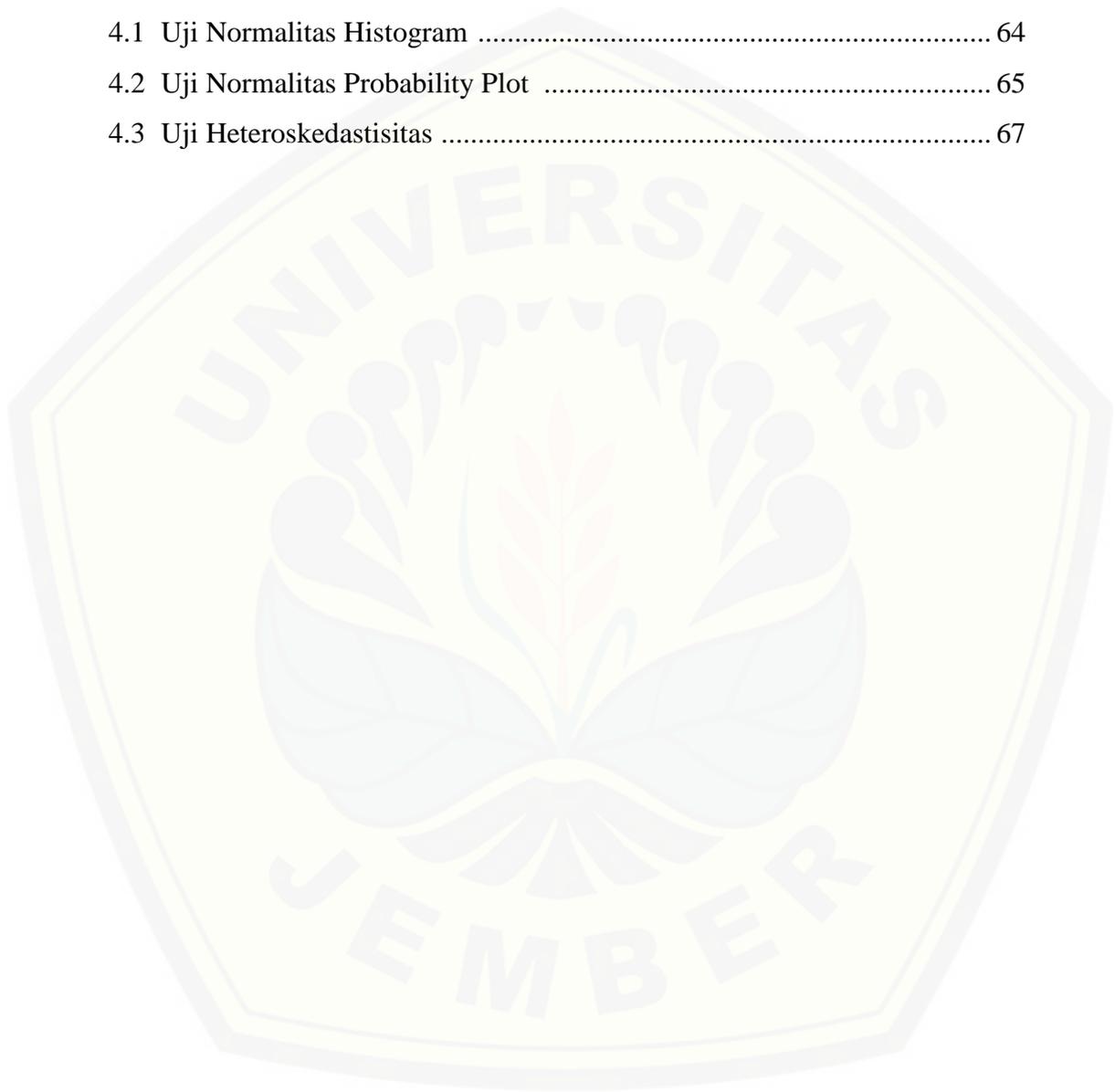
4.5 Uji Regresi Linier Berganda.....	68
4.5.1 Uji F.....	70
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi	71
4.5.3 Uji t	71
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	73
4.6.1 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Sektor Pemerintah Desa	73
4.6.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Sektor Pemerintah Desa	74
4.6.3 Pengaruh SPIP Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Sektor Pemerintah Desa.....	75
4.6.4 Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Sektor Pemerintah Desa	75
4.6.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Sektor Pemerintah Desa	76
4.6.6 Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Sektor Pemerintah Desa	77
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Keterbatasan	80
5.3 Saran	80

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Total ADD seluruh desa di Kecamatan Cluring	8
2.1	Tabel Kepala Desa yang Tersangkut Korupsi.....	23
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	31
3.1	Tabel Pengukuran Skala Likert.....	45
4.1	Tabel Distribusi Kuesioner	56
4.2	Tabel Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	57
4.3	Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	57
4.4	Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	58
4.5	Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	58
4.6	Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	59
4.7	Tabel Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	59
4.8	Tabel Rekapitulasi Hasil Uji Validitas	61
4.9	Tabel Hasil Uji Reliabilitas	63
4.10	Tabel Hasil Perhitungan Kolmogorov-Smirnov	65
4.11	Tabel Hasil Uji Multikolinieritas	66
4.12	Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	68
4.13	Tabel Hasil Uji F	70
4.14	Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi	71
4.15	Tabel Hasil Uji t	72

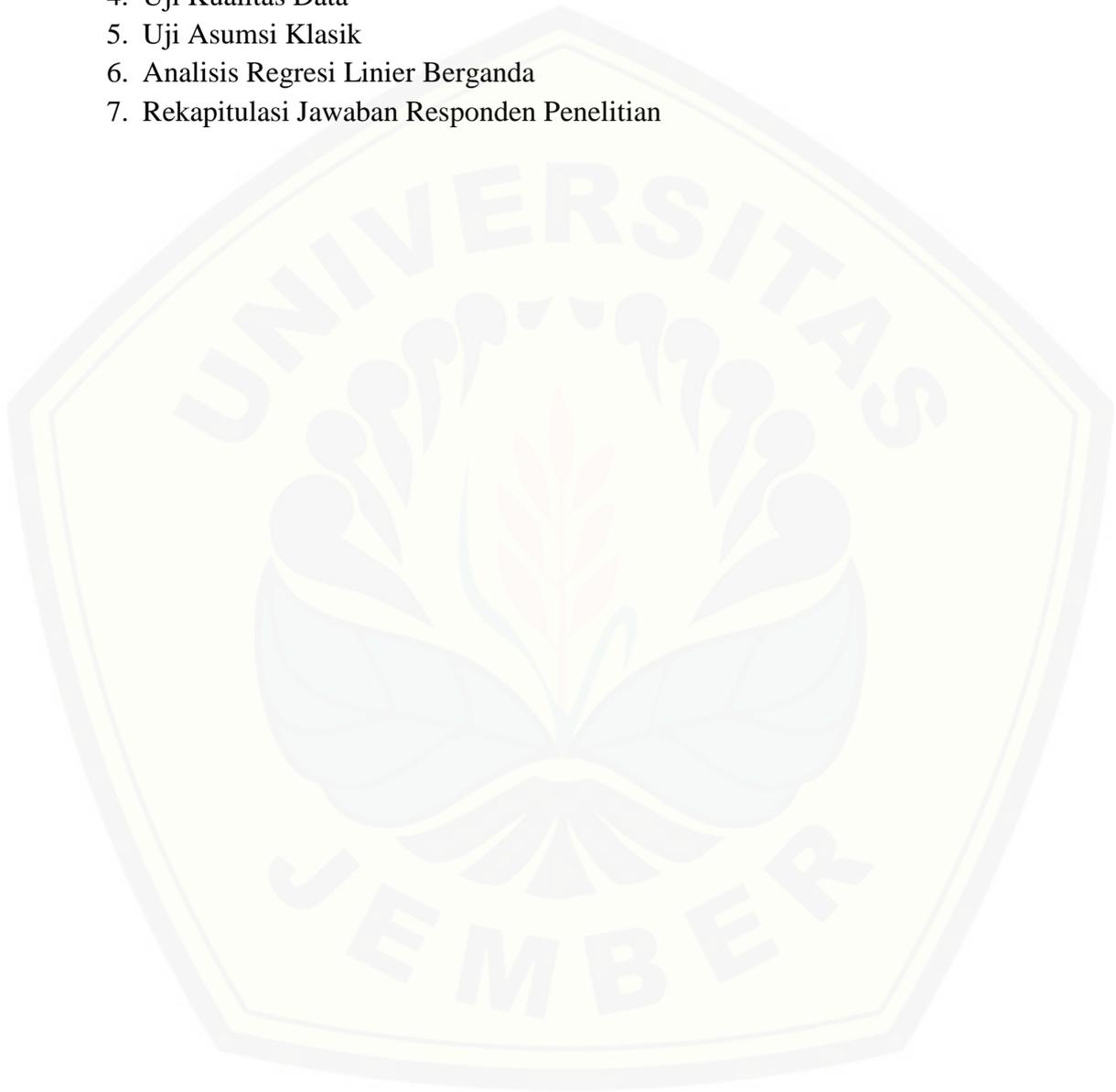
DAFTAR GAMBAR

2.1 <i>Fraud Triangle</i>	16
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	42
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	55
4.1 Uji Normalitas Histogram	64
4.2 Uji Normalitas Probability Plot	65
4.3 Uji Heteroskedastisitas	67



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kisi-sisi Instrumen Penelitian
2. Kuesioner Penelitian
3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
4. Uji Kualitas Data
5. Uji Asumsi Klasik
6. Analisis Regresi Linier Berganda
7. Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The Institute of Internal Auditor (IIA) dalam Karyono (2013) menyatakan bahwa *fraud* adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. *Fraud* menyangkut tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan cara yang salah. Kecurangan meliputi tipu daya, mengelabui, kelicikan sehingga pihak lain bisa ditipu atau dicurangi. Semua organisasi memiliki risiko terjadinya *fraud* atau kecurangan. Kecurangan tersebut dapat membawa dampak yang cukup fatal seperti kerugian keuangan negara, kerugian organisasi, hancurnya reputasi organisasi, dan dampak-dampak lainnya. *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) yang dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu Penyimpangan atas Aset (*Asset Missaporation*), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*).

Menurut *Wilopo* (2006), korupsi merupakan salah satu bentuk *fraud* yang paling sering terjadi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Di sektor pemerintahan sendiri korupsi telah terjadi dimana-mana dan telah melekat baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adanya sistem pengendalian eksternal maupun internal masih belum mampu untuk mencegah adanya *fraud*. Apalagi jika para pelaku merupakan orang-orang yang memiliki kuasa di dalam organisasi tersebut.

Menurut data Indeks Persepsi Korupsi 2016 yang dilansir oleh *Transparency International*, Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37. Sedangkan menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)* yang telah melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi Indonesia tahun 2016 menyatakan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 1,45 triliun dengan nilai suap sebesar Rp 31 miliar. Hal ini membuktikan bahwa

Indonesia masih berada pada permasalahan yang sama yaitu tingkat korupsi yang masih tinggi.

Indonesian Corruption Watch menyatakan pada tahun 2015, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dengan kerugian negara Rp 332,3 miliar dan nilai suap sebesar Rp 2,4 miliar (Kompas, 2016). Sedangkan pada tahun 2016 dihitung mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2016, Jawa Timur tetap menjadi daerah yang paling banyak menindak kasus korupsi yakni sebanyak 19 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 223,5 miliar. Begitu banyak kasus korupsi di Jawa Timur menandakan bahwa masih lemahnya pengawasan dalam kegiatan pemerintahan.

Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang dan mandiri baik dari segi pembangunan maupun perekonomiannya. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif dan transparan. Salah satu indikator kemajuan perekonomian Banyuwangi adalah diraihnya penghargaan Government Award 2016 sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik. Pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi terus melejit karena seluruh sektor perekonomian daerah bergerak bersama-sama mulai dari pertanian, perikanan, UMKM, sektor barang dan jasa hingga pariwisata. (sumber: merdeka, 2016).

Pada saat ini, perkembangan perekonomian di Banyuwangi menjadi pusat perhatian. Hal ini didukung oleh laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Pada tahun 2014 APBD Banyuwangi sebesar Rp 149.993.902.662,25. Selanjutnya pada tahun 2015 APBD Banyuwangi sebesar Rp 177.884.161.028,00 dan tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 APBD Banyuwangi sebesar Rp 297.531.160.106,00 (Sumber: RAPBD Kabupaten Banyuwangi). Meningkatnya APBD Banyuwangi dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perekonomian Banyuwangi.

Selain perkembangan ekonomi yang menjadi sorotan, Banyuwangi juga tidak luput dari kasus penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Pada tahun

2012, 10 PNS Banyuwangi dipecat karena terlibat tindak pidana korupsi yang dilakukan antara lain *markup* harga pembebasan lahan untuk bandara Banyuwangi, korupsi dana bantuan hukum, kasus rekayasa pangkat, dan korupsi pembebasan lahan jalan lingkar Ketapang (sumber: Tempo. 2012). Menurut data yang dihimpun detikNews (2016), Kejaksaan Negeri Banyuwangi menahan mantan kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) yaitu Anggrit Marjoko pada tahun 2016. Mantan pejabat itu terlibat kasus korupsi Proyek Bedah Rumah dan Perumahan Rakyat pada tahun 2013 sebesar Rp 736 juta.

Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat saja, namun juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dan desa. Kemajuan suatu negara tidak luput dari peran penting pemerintah desa karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa yang maju. Pemerintah desa menjadi tolak ukur utama dalam kemajuan suatu negara.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 menyebutkan bahwa sumber pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten (paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah (paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan pentingnya program dana desa yaitu efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan. Menurut data yang dihimpun oleh Liputan 6 (2017) terdapat penggelontoran dana desa sejak tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun untuk 74.093 desa. Kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun untuk 74.754 desa. Setahun kemudian

anggaran dana desa tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun untuk 74.954 desa. Bahkan pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 120 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan jika pada tahun 2016 setiap desa menerima dana Rp 614 juta maka pada tahun 2017 setiap desa menerima Rp 1 miliar sebagai dana desa (sumber: Sumatra.bisnis, 2017). Peningkatan jumlah tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terdapat di desa yang kurang pertumbuhannya. Hal ini menimbulkan masalah baru yaitu meningkatnya kasus korupsi terutama korupsi dana desa.

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2016 terdapat 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 Kepala Desa dengan total kerugian negara sebesar 10,4 miliar yang terkait pengelolaan dana desa. Bisa dikatakan meningkatnya korupsi dana desa merupakan akibat langsung dari kucuran 46,98 Triliun kepada seluruh desa di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya korupsi dana desa maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberdayakan pengawasan internal yang sudah ada.

Perkembangan masyarakat yang dinamis menuntut profesionalitas dari aparat pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah, sehingga diharapkan mampu mewakili masyarakat yang dipimpinnya. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pemerintahan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, keterbukaan dan transparansi yang diartikan masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya, serta partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. Transparansi dalam sistem pemerintahan harus didukung dengan perilaku yang baik dari para aparatnya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *fraud* menurut teori *Fraud Triangle* Cressey (1953) dalam Tuannakota (2017) antara lain tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Pressure adalah tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan *Fraud*. Tekanan yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecurangan adalah tekanan akan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang mendesak inilah menjadi pemicu seseorang untuk bertindak curang demi memenuhi kebutuhannya. Menurut SAS No. 99 dalam Zulkarnain (2013), terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat menimbulkan kecurangan karena adanya *finansial stability* dimana seseorang melakukan berbagai cara termasuk melakukan kecurangan demi menjaga stabilitas keuangan mereka, *external pressure* biasanya seseorang melakukan kecurangan karena mendapat tekanan dari luar seperti kebutuhan ekonomi, *personal finansial need* dimana keinginan seseorang untuk dapat mendapatkan uang dalam jumlah besar tanpa diimbangi dengan usaha, dan *finansial target* dimana seseorang yang memiliki target keuangan yang tinggi sehingga belum bisa tercapai meskipun telah bekerja. Dalam penelitian ini *pressure* diprosikan oleh kesesuaian kompensasi dan gaya kepemimpinan.

Menurut Mangkuprawira (2002:196) dalam Zulkarnain (2013), kompensasi merupakan bentuk pembayaran tunai langsung maupun pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat bagi karyawan dan insentif yang memotivasi karyawan bekerja keras dalam mencapai produktivitas kerja yang semakin tinggi. Kesesuaian kompensasi sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Apabila karyawan merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai maka akan mendorongnya untuk melakukan kecurangan. Begitupun sebaliknya, apabila karyawan merasa kompensasi yang diterima sesuai maka akan mengurangi potensi mereka untuk melakukan kecurangan.

Menurut Young dalam Kartono (2003) kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan mengendalikan bawahannya untuk dapat melakukan suatu pekerjaan atas kesadarannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Seluruh

instansi diharapkan memiliki gaya kepemimpinan yang baik yang dapat menekan tindakan karyawan merugikan organisasi.

Opportunity merupakan faktor yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Peluang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja bahkan orang yang tidak mendapat tekananpun dapat memanfaatkan peluang ini sehingga mereka bisa melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Biasanya peluang terjadi karena pengawasan atau kontrol internal yang lemah dan penyalahgunaan wewenang. Kuatnya kontrol internal dapat meminimalisir atau mengurangi peluang untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Dalam penelitian ini, *opportunity* diproksikan oleh sistem pengendalian internal pemerintah dan penegakan hukum.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dinyatakan dalam PSA No. 69 (IAI, 2001:139.2) dalam Apriadi (2013) menyatakan pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan pencapaian yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Semakin baik pengendalian internal, maka akan semakin rendah kecurangan yang terjadi.

Hukum digunakan untuk mengatur hubungan antar sesama dan antar individu dengan negara sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan tertib dan damai. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang ada dalam hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Soekanto, 2012:5). Penegakan hukum dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik yang mendukung tujuan yang akan dicapai (Sudrajat, 2010). Kepatuhan terhadap peraturan/hukum yang berlaku dapat mengurangi potensi *fraud* (kecurangan).

Rationalization merupakan faktor dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur karena rasionalisasi dapat membuat seseorang berfikir jika perbuatan

mereka benar dan hal ini dapat menciptakan berbagai tindak kecurangan (*fraud*) terjadi. Rasionalisasi adalah sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dari individu karyawan untuk merasionalkan tindakan kecurangan (Rae dan Subramanian, 2008) dalam Apriadi (2013). Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Dalam penelitian ini, *rationalization* diproksikan dengan persepsi mengenai komitmen organisasi dan perilaku tidak etis.

Menurut Mathis dan Jackson (2001) dalam Ramdhana (2015) komitmen organisasi merupakan tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut. Adanya komitmen dalam organisasi maka pegawai akan sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka dan memiliki keinginan yang lebih kuat untuk dapat berkerja pada organisasinya sekarang. Komitmen organisasi yang dimiliki oleh seseorang dapat dijadikan acuan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Buckley *et al.*, (1998) dalam Wilopo (2006), perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit dimengerti, yang jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Perilaku tidak etis ini seperti perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Adanya perilaku tidak etis dapat memicu tindakan seseorang untuk melakukan penyelewengan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan pada dinas kota Surakarta. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh negatif keefektifan sistem pengendalian internal terhadap *fraud*, terdapat pengaruh negatif kepuasan kompensasi terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh kultur organisasi terhadap *fraud*, terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap *fraud*, terdapat pengaruh negatif gaya kepemimpinan terhadap *fraud*, terdapat pengaruh negatif sistem pengendalian internal terhadap *fraud*, dan tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud* disektor pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2015) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan kabupaten Klaten, hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh negatif keefektifan pengendalian internal (PI) terhadap *fraud*, terdapat pengaruh negatif kultur organisasi terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh penegakan peraturan terhadap *fraud*, terdapat pengaruh positif keadilan distributif terhadap *fraud*, terdapat pengaruh negatif keadilan prosedural terhadap *fraud*, dan terdapat pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap *fraud*.

Berbagai penelitian tersebut belum memiliki hasil yang konsisten sehingga mendapatkan hasil yang bertolak belakang. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) tersebut. Penelitian ini dilakukan di Banyuwangi tepatnya pada desa-desa yang ada di Kecamatan Cluring. Berikut total ADD seluruh desa di kecamatan Cluring pada tahun 2016:

Tabel 1.1

Total ADD seluruh desa di Kecamatan Cluring

No	Nama Desa	ADD Tiap Desa
1	Plampangrejo	Rp 501.886.000
2	Sarimulyo	Rp 440.062.000
3	Tampo	Rp 504.081.000
4	Sraten	Rp 467.181.950
5	Kaliploso	Rp 462.540.000
6	Sembulung	Rp 505.073.000
7	Tamanagung	Rp 500.495.000
8	Cluring	Rp 490.861.000
9	Benculuk	Rp 484.683.000
JUMLAH		Rp 4.356.862.950

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa, 2016

Total Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 pada Kecamatan Cluring sangat besar yaitu Rp 4.356.862.950. Jumlah yang besar tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan benar oleh aparatur desa untuk seluruh kepentingan desa sehingga dapat menekan kasus kecenderungan kecurangan desa. Aparatur

desa berperan penting dalam pengalokasian dana desa sehingga membutuhkan aparat desa yang jujur dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Selain itu, menurut Inspektorat Banyuwangi pada tahun 2016 Kecamatan Cluring merupakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan diperkuat oleh visi Kecamatan Cluring yaitu mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, dan berorientasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mandiri, sejahtera.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menganalisis kembali kecenderungan *fraud* dengan pendekatan teori *fraud triangle* di pemerintahan desa. Penelitian ini diharapkan mampu menggali mengenai faktor atau elemen yang mempengaruhi perilaku kecurangan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir setiap faktor tersebut untuk mengurangi perilaku kecurangan yang ada di pemerintahan desa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini antarlain:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa?
4. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa?
6. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antarlain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antarlain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai kecurangan (*fraud*) dan faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam sektor pemerintahan desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga pihak pemerintahan desa dapat mengambil tindakan untuk meminimalisir perilaku kecurangan tersebut.

- b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku kecurangan yang terjadi dalam sektor pemerintahan desa dan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dalam memecahkan masalah sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis maupun praktiknya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Audit

Menurut Messier (2014:12) audit adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengimunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen berserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017). Menurut Arens, *et al* (2014:24) *auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.* Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti tentang informasi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa peneliti simpulkan bahwa audit merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai laporan keuangan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

a. Jenis-jenis Audit

Arens, *et al* (2014:32) mengklasifikasikan audit menjadi tiga jenis, ketiga jenis audit tersebut yaitu:

1) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi yang tertuang di dalam laporan keuangan

auditee untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau tidak. Hasil audit laporan keuangan kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya seperti kreditur, investor, pemerintah, dan lain-lain.

2) Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan merupakan audit yang bisa dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Tujuan dilakukannya audit kepatuhan yaitu menentukan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Misalnya, kriteria yang berasal dari manajemen mengenai prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit kepatuhan biasanya disebut sebagai fungsi audit internal karena dilakukan oleh auditor internal terlebih dahulu sebelum diaudit oleh auditor eksternal.

3) Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

b. Tipe-tipe Auditor

1) Auditor Internal

Auditor internal merupakan auditor yang dipekerjakan oleh suatu entitas untuk entitas tersebut. Tugas auditor internal adalah membantu untuk meningkatkan akurasi data keuangan maupun non keuangan. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal tidak wajib ditindaklanjuti oleh entitas.

2) Auditor Eksternal

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen merupakan auditor yang bekerja pada kantor-kantor akuntan publik. Berbeda dengan auditor internal, rekomendasi yang diberikan oleh auditor independen harus dilaksanakan oleh auditee.

3) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja untuk pemerintah. Tugas dari auditor pemerintah adalah untuk meninjau keuangan dan praktik lembaga-lembaga pemerintahan. Hasil audit auditor pemerintah akan dijadikan acuan dalam membuat dan mengelola kebijakan serta anggaran.

4) Auditor Forensik

Auditor forensik merupakan auditor yang mempunyai spesialisasi dalam tindakan kriminal keuangan. Auditor forensik memeriksa beberapa dokumen yang terkait dengan tindakan kriminal seperti kejahatan perbankan, *monery laundry*, melacak uang yang digunakan untuk mencari tahu di mana uang tersebut tersimpan, serta *fraud*.

2.1.2 Kecurangan (*Fraud*)

Menurut kamus Inggris-Indonesia dalam Karyono (2013), *fraud* diartikan sebagai kecurangan, penipuan, atau penggelapan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, kecurangan berarti ketidakjujuran dan keculasan. Di Indonesia *fraud* lebih dikenal dengan korupsi. Hal ini dianggap kurang tepat karena korupsi merupakan bagian dari *fraud*. Tampubolon (2005) dalam Wilopo (2006) berpendapat *fraud* tidak selalu sama dengan tindakan kriminal. Tindak kriminal didefinisikan sebagai *an intentional at that violates the Criminal Law under which no legal excuse applies*. Sedangkan *fraud* didefinisikan sebagai *any behaviour by which one person gains or intend to gain a dis honest advantage over another*. *Fraud* dikatakan kriminal apabila perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak. *Fraud* yang bukan kriminal masuk dalam kategori risiko operasional, sedangkan *fraud* yang sekaligus merupakan tindakan kriminal masuk dalam kategori risiko ilegal.

Menurut W. Steve Albrecht *et.,al* (2006:7) “*A generic term, embracing all multi various means which human ingenuity can device, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation No divinize and invariable rule can be laid down aas a general proposition in*

defining fraud, as it included surprise trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. Theory boundaries defining is are those which limit human knavery”.

Dari pengertian kecurangan (*fraud*) diatas, kecurangan adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan *fraud* yang meliputi cara yang mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik, dan tidak jujur yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk mengetahui pengertian diatas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.

2.1.3 *Fraud Triangle Theory*

Teori *fraud triangle* pertama kali dicetuskan oleh Donald Cressey yang merupakan salah seorang pendiri ACFE yang dikutip oleh pengarang auditing yaitu Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud Examination* dan Alfin A. Arend CS dalam *Auditing and Assurance Service* dalam Karyono, (2013) mengemukakan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan *fraud*. Seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan sendiri atau secara diam-diam melakukan penyelewengan. Ada 3 hal yang mendorong terjadinya suatu tindakan *fraud*, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi).



Gambar 2.1 *fraud triangle*

Cressey (1953) menyimpulkan bahwa orang yang dipercaya menjadi pelanggaran kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan dan tindak tanduk sehari-hari memungkinkan menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan dapat menyebabkan seseorang melakukan *fraud*. Tekanan (*pressure*) merupakan keadaan dimana seseorang merasa ditekan dan dijadikan motivasi bagi seseorang untuk melakukan tindakan. Sebenarnya *pressure* dapat berdampak positif apabila dapat dipahami dengan baik, seperti dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan kemampuan untuk mengingat. Akan tetapi, *pressure* dapat menjadi salah satu sumber munculnya *fraud* dan menjadi salah satu elemen dari *fraud triangle*. Albrecht *et.,al* (2006: 33-36) mengklasifikasikan tekanan kedalam empat kelompok antarlain:

1) Tekanan keuangan (*Financial Pressure*)

Sebuah studi menunjukkan bahwa hampir 95% tindakan kecurangan terjadi karena adanya tekanan keuangan dan kebiasaan buruk. Tekanan keuangan yang berhubungan dengan terjadinya kecurangan adalah sifat serakah, boros, jumlah hutang yang besar, kebutuhan keuangan yang tidak terduga, dan kerugian keuangan akibat pemutusan hubungan kerja.

2) Kebiasaan buruk (*Vice Pressure*)

Kebiasaan buruk seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kecurangan. Apabila seseorang tidak memiliki uang untuk memenuhi kebiasaan buruknya maka dia akan cenderung melakukan kejahatan seperti kecurangan.

3) Tekanan Pekerjaan (*Work-Related Pressures*)

Tekanan dalam pekerjaan dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang biasanya disebabkan karena upah yang kurang memadai, kurangnya penghargaan atas kinerja karyawan, dan rasa khawatir akan di PHK yang dilakukan oleh perusahaan.

4) Tekanan lainnya (*Other Pressures*)

Tindakan kecurangan dapat timbul karena tekanan-tekanan lain seperti keinginan untuk melawan system (*beat the system*) atau tuntutan pemenuhan gaya hidup mewah.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan merupakan suatu keadaan yang bisa terjadi kapan saja yang dapat dimanfaatkan seseorang baik itu untuk hal positif maupun negatif. Para pelaku kecurangan percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Kesempatan dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik, dan penyalahgunaan posisi. Diantara tiga faktor lainnya, kesempatan merupakan faktor yang paling mendasari terjadinya kecurangan (*fraud*). Albrecht *et.,al* (2006:36-48) mengklasifikasikan kesempatan kedalam dua kelompok, antarlain:

1) Faktor Pengendalian (*Control Factor*)

Tindakan kecurangan dapat dideteksi dan dicegah dengan pengendalian internal yang efektif dari organisasi. Pengendalian internal yang efektif meliputi sistem akuntansi, lingkungan pengendalian, dan aktivitas/prosedur pengendalian.

2) Faktor non-Pengendalian (*Non-Control Factor*)

Selain faktor pengendalian terdapat faktor non-pengendalian yang juga dapat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Faktor non-pengendalian ini antara lain:

a) Kegagalan untuk menindak pelaku kecurangan

Seseorang yang melakukan kecurangan dan tidak diproses dengan hukum memungkinkan orang tersebut untuk mengulangi perilaku penipuan tersebut. Dalam organisasi kadang mereka mengabaikan sebuah ketidakjujuran karena menuntut hanya akan menimbulkan masalah baik dari segi biaya maupun waktu. Secara tidak sadar mereka telah mengirim sinyal kepada orang lain dalam organisasinya bahwa pelaku pelanggaran tidak akan mendapat konsekuensi yang signifikan. Jika dikombinasikan dengan tekanan dan rasionalisasi dapat menyebabkan semakin banyaknya perilaku kecurangan dalam organisasi. Persepsi kesempatan akan hilang jika pelaku pelanggaran tidak hanya dapat ditemukan tetapi akan mendapat sanksi yang signifikan.

b) Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja

Ketidakmampuan akan menilai kualitas kinerja merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Pada saat kita menggunakan jasa dari seorang akuntan, pengacara, dokter, dan jasa profesional lainnya tidak mudah untuk menilai apakah nilai yang kita bayarkan sesuai dengan kinerja yang telah mereka berikan. Pada investigasi yang dilakukan Departemen Keluhan Konsumen California ditemukan bahwa ketika seseorang dihadapkan dengan tekanan untuk gagal, dan percaya bahwa orang lain tidak akan tahu apakah hal yang dilakukannya benar atau salah, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kecurangan.

c) Kurangnya akses informasi

Seseorang dapat menjadi korban penipuan karena korban tidak memiliki akses ke informasi yang dimiliki oleh pelaku terutama

penipuan yang dilakukan terhadap investor dan pemegang saham. Untuk menghindari terjadinya penipuan, seseorang harus meminta pengungkapan penuh termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, sejarah bisnis, dan informasi lainnya yang bisa mengungkapkan adanya penipuan dalam organisasi tersebut.

d) Kelemahan dari pengendalian dan pendeteksian kecurangan

Lingkungan pengendalian yang baik akan membentuk suasana dimana perilaku yang baik akan menjadi sebuah model bagi yang lain, karyawan yang jujur, dan seluruh karyawan memiliki tanggungjawab atas pekerjaannya masing-masing. Sistem akuntansi menyediakan pencatatan yang membuat seseorang tidak dengan mudah untuk mendapatkan keuntungan atas akses data organisasi, menyembunyikan kecurangan, dan mengubah aset yang dicuri tanpa diketahui oleh orang lain.

e) Kurangnya jejak audit.

Organisasi berusaha keras untuk membuat dokumen yang menjadi jejak audit sehingga transaksi dapat dipahami. Kebanyakan penipuan selalu memanipulasi laporan laba rugi, hal ini dikarenakan saldo dari akun-akun laba rugi akan ditutup pada akhir periode. Jika penipuan yang dilakukan tidak ditemukan sebelum akhir tahun maka jejak audit akan terhapus dan secara otomatis penipuan akan sulit untuk dideteksi.

c. Rasionalisasi (*Rasionalization*)

Rasionalisasi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perilaku kecurangan dimana mereka mencari-cari pembenaran atas tindakannya. Seseorang yang menganggap bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan tindakan yang benar dan memang haknya sehingga apa yang ia lakukan bukanlah suatu tindak kecurangan. Seperti yang kita ketahui kejahatan kerah putih atau *white collar crime* memiliki ciri khas kurangnya perasaan atau ketidakpedulian pelaku yang berasal dari serangkaian alasan atau rasionalisasi

untuk membebaskan diri dari rasa bersalah yang timbul dari perilaku mereka yang menyimpang (Karyono,2013).

Albrecht *et.,al* (2006:51) memberikan beberapa contoh rasionalisasi yang umum dilakukan oleh pelaku kecurangan , antarlain:

- 1) Tidak ada pihak yang akan tersakiti
- 2) Pelaku hanya meminjam uang yang diambil dan akan mengembalikan uang tersebut dikemudian hari
- 3) Organisasi berhutang budi kepada pelaku
- 4) Pelaku merasa berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan secara legal
- 5) Tindakan kecurangan tersebut dilakukan demi kebaikan

Secara garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut Kurniawan (2014) beberapa alasan yang digunakan oleh pelaku *fraud* untuk mencari pembenaran, antara lain:

- 1) Pelaku menganggap bahwa apa yang dilakukannya sudah merupakan hal biasa
- 2) Pelaku merasa telah berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya menerima kompensasi yang lebih banyak daripada kompensasi yang telah diterimanya
- 3) Pelaku merasa bahwa ia hanya meminjam dari organisasi yang suatu saat akan dikembalikan
- 4) Pelaku beranggapan bahwa perbuatannya tidak melukai siapapun dan hal tersebut hanya merupakan masalah yang kecil.

2.1.4 Klasifikasi *Kecurangan (Fraud)*

Kurniawan (2014) mengklasifikasikan *Kecurangan (fraud)* berdasarkan klasifikasi ACFE, klasifikasi AFCE dipilih karena klasifikasi ini dapat digunakan

di seluruh organisasi, baik itu organisasi swasta maupun organisasi sektor publik. Berdasarkan *Fraud Tree* yang dikeluarkan oleh ACFE, *fraud* diklasifikasikan menjadi tiga kategori, antaralain:

a. *Corruption* (korupsi)

Korupsi dilakukan dengan menyalahgunakan pengaruh yang dimiliki dalam melaksanakan transaksi yang mencederai tugasnya kepada organisasi sehingga dapat memperoleh manfaat tertentu. Menurut ACFE korupsi terbagi kedalam konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi.

1) Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi yang tidak diungkapkan kepada orang lain atas suatu transaksi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.

2) Penyuapan

Penyuapan adalah segala macam bentuk penerimaan barang atau jasa tertentu untuk mempengaruhi tindakan orang lain yang berkaitan dengan pekerjaannya. Barang atau jasa yang dimaksud dapat berupa uang, fasilitas yang luar biasa, keuntungan ekonomi dengan segala macam kemewahan seperti mobil mewah.

3) Gratifikasi Ilegal

Gratifikasi ilegal adalah pemberian sesuatu yang memiliki nilai (natura, parcel, hadiah pernikahan, hadiah ulang tahun atau hadiah kenaikan jabatan) setelah suatu terjadi. Gratifikasi dilarang dalam organisasi swasta dan lembaga pemerintahan karena kode etik di organisasi-organisasi tersebut biasanya melarang seorang pejabat atau manajemen senior menerima barang-barang apapun diatas nominal tertentu.

4) Pemerasan Ekonomi

Pemerasan ekonomi bisa terjadi karena pegawai yang memiliki kewenangan tertentu akan mengancam pihak-pihak lain untuk memberikan sesuatu. Pemerasan ekonomi berlawanan dengan penyuapan. Dalam penyuapan, inisiatif berasal dari pihak pemberi uang namun dalam pemerasan inisiatif akan berasal dari pihak penerima uang.

b. Asset Missappropriation

Asset Missappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset/harta organisasi atau pihak lain. Hal ini merupakan *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur.

c. Fraudulent statement

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau biasanya disebut *window dressing*.

2.1.5 Pemerintahan Desa

Pengertian desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui, dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 menyatakan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, dan perangkat lainnya seperti sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

2.1.6 *Fraud* dalam Sektor Pemerintahan Desa

Saat ini hampir semua mata tertuju pada desa mulai dari pejabat, akademisi, politikus yang sama-sama ingin melihat dinamika pembangunan desa yang telah diikuti dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kecurangan (*fraud*) tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan pusat saja tetapi juga terjadi pada sektor pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa. Salah satu

contoh dari kecurangan (*fraud*) yaitu kecurangan pengelolaan aset. Potensi kecurangan pengelolaan aset ini perlu diantisipasi dan dikendalikan melalui struktur dan sistem sehingga penggunaan dana aset dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana desa. Beberapa potensi kecurangan dalam pengelolaan aset perlu diidentifikasi bersama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut.

Korupsi merupakan salah satu contoh dari *fraud* yang paling sering terjadi di desa. Korupsi yang paling sering terjadi dalam bentuk manipulasi pencatatan yang merugikan negara. Korupsi ini sering dilakukan kepala desa karena kepala desa merupakan posisi tertinggi dalam struktur organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan desa. Rahman (2011) menyatakan hal-hal yang memotivasi kepala desa untuk melakukan korupsi yaitu: pertama, tugas dan tanggungjawab kepala desa yang harus siap 24 jam untuk melayani masyarakat dan profesi kepala desa tidak mengenal hari libur yang tidak diimbangi dengan gaji yang didapatkan. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas bagus namun sisi modalitas ekonomi lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak korupsi. Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun tidak menutup kemungkinan perangkat-perangkat desa yang lain juga melakukan kecurangan jika didorong tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

Tabel 2.1

Kepala Desa yang tersangkut Korupsi

Kepala Desa	Kota/Kabupaten	Dugaan Korupsi	Keterangan
Yusron Munir	Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang	Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBdes)	Korupsi meliputi bangunan fisik dengan nilai kerugian Rp 200 juta dari anggaran 1,8 miliar (sumber: Tribunnews)
Hamdani	Desa Penaga,	Anggaran Alokasi	Korupsi yang

	Kecamatan Teluk Bintan	Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBdes)	dilakukan meliputi proyek fisik dan non fisik meliputi bangunan seperti siskamling sementara kegiatan non fisik berupa kegiatan olahraga dengan nilai kerugian sementara Rp 300 juta dari total anggaran ADD dan APBdes 1,8 miliar (sumber: Tribunnews).
Kusminto Lailatul	Desa Glagah Arum, Kecamatan Porong	Korupsi Alokasi Dana Desa	Mengorupsi dana untuk keperluan pribadi senilai Rp. 225 juta dari total ADD Rp 1 miliar (sumber:Metrotvne ws).
YP	Desa Oma , Maluku Tengah	Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 289 juta (sumber: kompas.com)
Agus Mulyadi	Pamekasan, Madura	Penyimpangan anggaran proyek infrastruktur	Dugaan penyimpangan anggaran proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta (sumber: Kompas.com)

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Faktor penyebab kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam penelitian ini didasarkan atas teori *Fraud Triangle* yang terdiri dari tiga faktor yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam penelitian ini, masing-masing faktor penyebab kecenderungan kecurangan diproksikan dengan faktor lain sehingga kecurangan dapat terjadi. Tekanan diproksikan dengan kesesuaian kompensasi dan gaya kepemimpinan. Kesempatan diproksikan dengan sistem pengendalian

internal pemerintah dan penegakan hukum. Serta rasionalisasi diproksikan dengan komitmen organisasi dan perilaku tidak etis.

2.2.1 Kesesuaian Kompensasi

Tujuan Manajemen kompensasi secara umum menurut Rivai (2010:743) adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan keberhasilan strategi organisasi dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Kesesuaian kompensasi dapat diartikan sebagai pemberian pihak organisasi atau badan hukum kepada seseorang atas jasa yang diberikannya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk upah, gaji, komisi dan bonus (Zilmi, 2013).

Dari beberapa definisi diatas, para ahli mengemukakan pengertian kompensasi yang beragam meskipun pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai imbalan dari pekerjaan mereka. Dengan kata lain, karyawan bekerja untuk organisasi dengan harapan mendapatkan kompensasi yang sesuai atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kompensasi sangat penting karena kompensasi merupakan sumber penghasilan bagi karyawan dan keluarganya. Kompensasi sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja karena karyawan banyak dipengaruhi oleh terpenuhi tidaknya kebutuhan minimal kehidupan pegawai dan keluarga. Komponen-komponen yang menjadi pertimbangan kompensasi menurut (Rivai,2010:744) terdiri dari:

a. Gaji

Gaji adalah imbalan atau balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Upah

Upah adalah imbalan berupa uang yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

c. Insentif

Insentif adalah imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan tergantung kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan

d. Kompensasi tidak langsung

Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan organisasi terhadap semua karyawan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Kesesuaian kompensasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Karyawan yang diberikan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan maka akan merasa puas sehingga mereka akan bekerja lebih loyal kepada organisasi.

2.2.2 Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku yang dirancang untuk memadukan kepentingan-kepentingan organisasi dan personalia guna mengejar beberapa sasaran (Flippo, 1994) dalam Nurjanah (2008). Gaya kepemimpinan merupakan sikap seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan mengendalikan bawahannya untuk dapat bekerja bersama guna mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah tingkah laku seorang pemimpin yang berinteraksi dengan bawahannya yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin

Likert dalam Ambarwati (2015) mengelompokkan gaya kepemimpinan dalam 4 sistem, antarlain:

a. *Exploitive-Autoritativ*

Manager-manager sangat otokratis, kurang percaya pada bawahan, komunikasi satu arah kebawah, memotivasi orang-orang melalui rasa takut dan jarang memberi ganjaran, membatasi pengambilan keputusan pada tingkat teras, dan memperlihatkan karakteristik yang sama.

b. *Benevolent-Authorative*

Manajemen sedikit yakin dan percaya kepada bawahan, tidak selalu memotivasi bawahan dengan ancaman atau hukuman, memperbolehkan komunikasi keatas, dan memperhatikan ide karyawan meskipun dalam pengambilan keputusan masih melakukan pengawasan yang ketat

c. *Consultative*

Manager memiliki rasa yakin dan percaya kepada bawahan, berusaha memperoleh ide-ide dan pendapat dari bawahan dan menggunakannya secara konstruktif, kadang menggunakan ancaman atau hukuman untuk memotivasi, dan komunikasi dua arah yang menerima keputusan spesifik yang dibuat oleh bawahan.

d. *Participative*

Manager yang memiliki kepercayaan penuh terhadap karyawan, berusaha memperoleh ide-ide dan pendapat dari bawahan dan menggunakannya secara konstruktif, memberikan ganjaran ekonomi atas dasar keikutsertaan dan keterlibatan kelompok dalam bidang-bidang seperti penyusunan tujuan, komunikasi dua arah dan menjadikan karyawan sebagai kelompok kerja, mendorong adanya pengambilan keputusan pada semua tingkat organisasi.

2.2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya SPIP diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Secara teknis, pelaksanaan SPIP ini harus

dikerjakan dan menjadi tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah baik yang ada di pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3), SPIP mempunyai tujuan antaralain:

- a. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
- b. Keandalan pelaporan keuangan
- c. Pengamanan aset negara
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2.2.4 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya penegakan hukum yang adil dan transparan akan mendorong terciptanya kondisi yang aman dan tentram tanpa adanya protes dari satu pihak yang merasa dirugikan karena penegakan sebuah hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, menciptakan dan melahirkan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2012:5). Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

2.2.5 Komitmen Organisasi

Menurut Kurniawan (2011) dalam Najahningrum (2013) komitmen organisasi merupakan komitmen yang diciptakan oleh individu dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi. Komitmen organisasi merupakan komitmen yang diciptakan oleh individu yang dapat terwujud apabila individu menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing dalam organisasi (Kurniawan, 2011) dalam Widiutami (2017). Komitmen organisasi adalah sikap yang dimiliki individu atau pegawai yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi serta dan bersedia untuk bekerja keras bagi organisasi sehingga membuat individu betah dan tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan kelangsungan organisasi.

Allen dan Mayer (1997) dalam Najahningrum (2013) mengemukakan tiga komponen model komitmen terhadap organisasi, antara lain:

a. *Affective commitment* (komitmen afektif)

Komitmen afektif terjadi apabila karyawan menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional dengan organisasi tempat dia bekerja. Komitmen organisasi menunjukkan kuatnya keinginan seseorang untuk terus bekerja bagi organisasi karena merasa mempunyai nilai yang sama dengan organisasi tersebut. Komitmen ini berkembang oleh dorongan adanya kenyamanan, keamanan, dan manfaat lain yang dirasakannya dalam organisasi yang tidak diperoleh dari organisasi lain.

b. *Continuance commitment* (komitmen berkelanjutan)

Komitmen berkelanjutan terjadi apabila individu memiliki keinginan untuk tetap bertahan dalam organisasi karena tidak menemukan pekerjaan lain dan didasarkan pada pertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan apabila akan meninggalkan organisasi.

c. *Normative commitment* (komitmen normatif)

Komitmen normatif adalah komitmen yang timbul dari nilai-nilai karyawan terkait dengan kewajiban untuk tetap berada dalam organisasi karena adanya tanggung jawab dari seorang pegawai

2.2.6 Perilaku Tidak Etis

Dalam kehidupan bermasyarakat perilaku sangatlah penting karena interaksi antar individu dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika. Menurut Dijk (2000) dalam Ahriati (2015) menyatakan bahwa perilaku tidak etis

adalah suatu perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Tang et al (2003) dalam Shintadevi (2015) menjelaskan bahwa indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam organisasi terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan sumber daya organisasi dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa.

Dilihat dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis juga akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Perilaku tidak etis bisa dilakukan siapa saja baik seseorang yang memiliki kekuasaan maupun yang tidak memiliki kekuasaan. Semakin tinggi perilaku tidak etis maka semakin tinggi juga tingkat kecurangan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kecurangan (*fraud*) telah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Shintadevi (2015) yang memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perilaku tidak etis dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Apabila keefektifan pengendalian internal lemah maka akan membuka peluang terjadinya kecurangan (*fraud*). Hasil ini mendukung teori *Fraud Triangle* dimana semakin tinggi tingkat keefektifan pengendalian internal maka akan mengurangi tindak kecurangan (*fraud*) yang terjadi.

Adinda (2015) melakukan penelitian yang terkait faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) paa sektor pemerintahan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh positif antara keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, serta tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi dan

penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmanta dan Ikhsan (2014) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) pada sektor pendidikan di kota Semarang. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh antara keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, dan budaya organisasi dengan kecurangan (*fraud*). Terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal dengan kecurangan (*fraud*). Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan kecurangan (*fraud*) dan terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perilaku tidak etis maka semakin tinggi pula tindak kecurangan (*fraud*) yang terjadi.

Downida (2017) melakukan penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada SKPD kota Kediri memperoleh hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Ketaatan peraturan memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin taatnya terhadap peraturan pada instansi maka semakin kecil kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang terjadi. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) dan variabel-variabel yang berkaitan dalam penelitian ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	PENELITI DAN JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Wilopo, 2006 <i>Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan</i>	1. Kecenderungan Kecurangan 2. Perilaku Tidak Etis 3. Keefektifan Pengendalian Internal 4. Kesesuaian	Penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan

	<i>Usaha Milik Negara di Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kompensasi 5. Ketaatan Aturan Akuntansi 6. Asimetri Informasi 7. Moralitas Manajemen 	dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Penelitian ini juga menemukan hal yang bertentangan dengan hipotesis serta teori dan hasil penelitian sebelumnya bahwa kompensasi yang sesuai yang diberikan perusahaan ternyata tidak menurunkan perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi
2.	<p>Ni Putu Sri Widiutami, 2017</p> <p><i>Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Pengendalian Internal 2. Ketaatan Aturan Akuntansi 3. Komitmen Organisasi 	Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Komitmen Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng
3.	<p>Mustikasari, DP., 2013</p> <p><i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Hukum/Peraturan 2. Keefektifan Pengendalian Internal 3. Asimetri Informasi 4. Kesesuaian Kompensasi 	Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Keadilan Prosedural 6. Budaya Etis Manajemen 7. Komitmen Organisasi 	<p>etis manajemen, dan komitmen organisasi terhadap <i>fraud</i>. Terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap <i>fraud</i>. Dan tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap <i>fraud</i>.</p>
4.	<p>Shintadevi, PF., 2015 <i>Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keefektifan Pengendalian Internal 2. Ketaatan Aturan 3. Kesesuaian Kompensasi 4. Perilaku Tidak Etis 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara keefektifan pengendalian internal dengan kecenderungan kecurangan akuntansi, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara ketaatan aturan akuntansi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi, terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan kecenderungan kecurangan akuntansi.</p>
5.	<p>Zulkarnain , RM., 2013 <i>Analisis Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Fraud</i> di Sektor Publik 2. Keefektifan Pengendalian Internal 3. Kepuasan Kompensasi 4. Kultur Organisasi 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif keefektifan sistem pengendalian internal terhadap <i>fraud</i>, terdapat pengaruh negatif kepuasan kompensasi terhadap</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Perilaku Tidak Etis 6. Gaya Kepemimpinan 7. Sistem Pengendalian Internal 8. Penegakan Hukum 	<p><i>fraud</i>, tidak terdapat pengaruh kultur organisasi terhadap <i>fraud</i>, terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap <i>fraud</i>, terdapat pengaruh negatif gaya kepemimpinan terhadap <i>fraud</i>, terdapat pengaruh negatif sistem pengendalian internal terhadap <i>fraud</i>, dan tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap <i>fraud</i> disektor pemerintahan</p>
6.	<p>Rachmanta R dan Ikhsan S, 2014 <i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) di Sektor Pendidikan Kota Semarang</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan Distributif 2. Keadilan Prosedural 3. Penegakan Peraturan 4. Budaya Organisasi 5. Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 6. Perilaku Tidak Etis 7. Komitmen Organisasi 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, dan budaya organisasi dengan kecurangan. Terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal dengan kecurangan, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan kecurangan, dan terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecurangan.</p>
7.	<p>Kurrohman, T., Lailiyah, A., dan Wahyuni, N.I. 2017 Determinant of Fraudulent in</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Kompensasi 2. Keadilan Prosedural 3. Penegakan 	<p>Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keadilan prosedural, budaya etis organisasi, dan komitmen</p>

	GOVERNMENT: An Empirical Analysis in Situbondo Regency, East Java, Indonesia. <i>Kabupaten Bondowoso</i>	Hukum/ Peraturan 4. Keefektifan Pengendalian Internal 5. Budaya Etis Organisasi 6. Komitmen Organisasi	organisasi berpengaruh terhadap persepsi kecurangan (<i>fraud</i>) di instansi pemerintahan. Sedangkan kesesuaian kompensasi, penegakan hukum/peraturan, dan keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap persepsi kecurangan (<i>Fraud</i>) di instansi pemerintahan.
8.	Ahriati, D., P, Basuki., dan E, Widiastuty. 2015 <i>Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur</i>	1. Sistem Pengendalian Internal 2. Asimetri Informasi 3. Perilaku Tidak Etis 4. Kesesuaian Kompensasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). Tidak terdapat pengaruh antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). Terdapat pengaruh antara perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). Dan tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (<i>fraud</i>)
9.	Pramudita, Aditya. 2013 <i>Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga</i>	1. Gaya Kepemimpinan 2. Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 3. Komitmen	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal,

		Organisasi 4. Kesesuaian Kompensasi 5. Budaya Etis Organisasi 6. Penegakan Hukum	kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi terhadap kecurangan (<i>fraud</i>). tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap kecurangan (<i>fraud</i>).
10.	Wulandari, S., dan A, Zaki. 2014 <i>Determinan Terjadinya Fraud di Instansi Pemerintahan (persepsi pada pegawai BPK RI Perwakilan NTB).</i>	1. Gaya Kepemimpinan 2. Kesesuaian Kompensasi 3. Budaya Etis Organisasi 4. Efektivitas Sitem Pengendalian Intern 5. Komitmen Manajemen	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi,efektivitas sistem pengendalian intern, dan komitmen manajemen terhadap <i>fraud</i> . Tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan, penegakan hukum, dan budaya etis organisasi terhadap <i>fraud</i> .

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Pemerintahan Desa

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berupa uang maupun barang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, bertujuan untuk balas jasa terhadap organisasi” (Hasibuan & Malayu, 2002:117). Kompensasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam suatu organisasi. Hal ini didukung teori yang ada bahwa seseorang yang terpuaskan kompensasinya tidak akan melakukan reaksi kompromistis dalam bentuk tindakan korupsi (Darsono, 2001). Bagi karyawan, kesesuaian kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Kesesuaian kompensasi dirancang agar mampu menarik perhatian, mempertahankan dan mendorong karyawan agar bekerja secara produktif. Dengan

adanya kompensasi yang memadai akan mendorong karyawan bekerja sesuai dengan target manajemen organisasi dan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*). Apabila kesesuaian kompensasi karyawan tidak diperhatikan oleh organisasi maka akan mendorong karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan penelitian dari Shintadevi (2015) menyatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013) juga menunjukkan bahwa kompensasi juga berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian kompensasi maka akan semakin kecil kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*).

H₁ : Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa

2.4.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Pemerintahan Desa

Thoah (2007) menyatakan gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat. Perilaku karyawan terbentuk dari cara pemimpin dalam mencapai sasaran organisasi dan memberikan motivasi. Karyawan cenderung mengikuti peraturan organisasi ketika dipimpin dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat (Pramudita, 2013). Lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisatoris, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinannya sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan yang etis dibentuk oleh gaya kepemimpinan yang baik yang akan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan yang dilakukan karyawan (COSO, 2004) dalam Pramudita (2013).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku orang lain untuk

mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan dapat dikatakan akan berpengaruh terhadap risiko kecurangan (*fraud*). Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang baik akan meminimalisir pegawainya untuk melakukan tindakan *fraud*. Begitupun sebaliknya, pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang buruk maka akan mendorong pegawai melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

Gaya kepemimpinan yang baik dapat mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) menyatakan terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Penelitian yang dilakukan Pramudita (2013) juga memiliki hasil yang sama yaitu terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kecurangan (*fraud*). Dapat dikatakan bahwa lingkungan etis yang dibentuk oleh gaya kepemimpinan akan menekan tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh karyawan.

H₂ : Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Pemerintahan Desa

Sistem pengendalian internal mencakup rencana dan ukuran yang diadopsi dalam suatu usaha atau bisnis untuk melindungi aset-aset, memeriksa akurasi dan keandalan suatu laporan keuangan, mendorong efisiensi kegiatan dan kepatuhan pada kebijakan yang telah ditetapkan (Subramaniam, 2008) dalam Sudiby (2016). Sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangat penting yaitu untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan (Wilopo, 2006). Salah satu contoh pengendalian internal adalah adanya beberapa prosedur yang harus dilalui ketika akan melakukan transaksi seperti otorisasi dari pihak yang berwenang. Jika pengendalian tidak berjalan dengan baik, maka prosedur tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang akan membuka kesempatan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional organisasi untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur dalam melakukan seluruh kegiatan operasional pemerintah. Dengan adanya SPIP dapat memberikan suatu keyakinan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat tercapai secara efektif dan efisien dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian yang baik dan efektif dapat mengurangi kecenderungan kecurangan yang akan terjadi. Pada penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Shintadevi (2015) menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan kecenderungan kecurangan.

H₃ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa

2.4.4 Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Pemerintahan Desa

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Taqwuddin, 2012) dalam Zulkarnain (2013). Menurut Amrizal (2004) dalam Putro (2009), pada dasarnya praktik kecurangan akan terus berulang dalam suatu entitas jika pegawai tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Hal ini membutuhkan kesadaran masyarakat sendiri dimana kesadaran masyarakat akan timbul apabila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik seperti

tidak diberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran maka pelaku akan melakukan pelanggaran tersebut terus-menerus yang secara otomatis dapat meningkatkan tindakan kecurangan. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan.

Penegakan hukum yang diterapkan dapat mengukur ada tidaknya resiko *fraud* di suatu instansi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum yang baik di suatu instansi pemerintahan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*).

**H₄ : Penegakan Hukum berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*)
di sektor pemerintahan desa**

2.4.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Pemerintahan Desa

Pamungkas (2016) komitmen organisasi merupakan “suatu pengalaman psikologis untuk individu maupun profesional yang berbeda”. Komitmen Organisasi merupakan perilaku penting yang digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Komitmen dapat terwujud apabila individu menjalankan hak dan tugas mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya. Wilopo (2006) mengatakan bahwa upaya menghilangkan kecenderungan kecurangan dapat dilakukan dengan memperbaiki moral dari pengelolaan organisasi yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap organisasi.

Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi berarti telah memahami bahwa ketika bekerja tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan kepentingan untuk dirinya sendiri. Individu yang memiliki komitmen tinggi akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Komitmen organisasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan pegawai.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Rachmanta dan Ikhsan (2014) terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*). Pada penelitian yang dilakukan Widiutami (2017) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa komitmen organisasi juga berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan menekan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*).

H₅ : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa

2.4.6 Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Pemerintahan Desa

Menurut Griffin dan Ebert (2006) dalam Adelin (2013), perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah. Perilaku tidak etis muncul karena adanya rasa kurang puas dan kecewa terhadap hasil yang didapat organisasi. Lemahnya pengawasan manajemen dapat mendorong karyawan untuk melakukan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan suatu organisasi. Menurut CIMA dalam Wilopo (2008) berpendapat bahwa budaya organisasi dengan standar etika yang rendah akan memiliki resiko kecurangan yang tinggi.

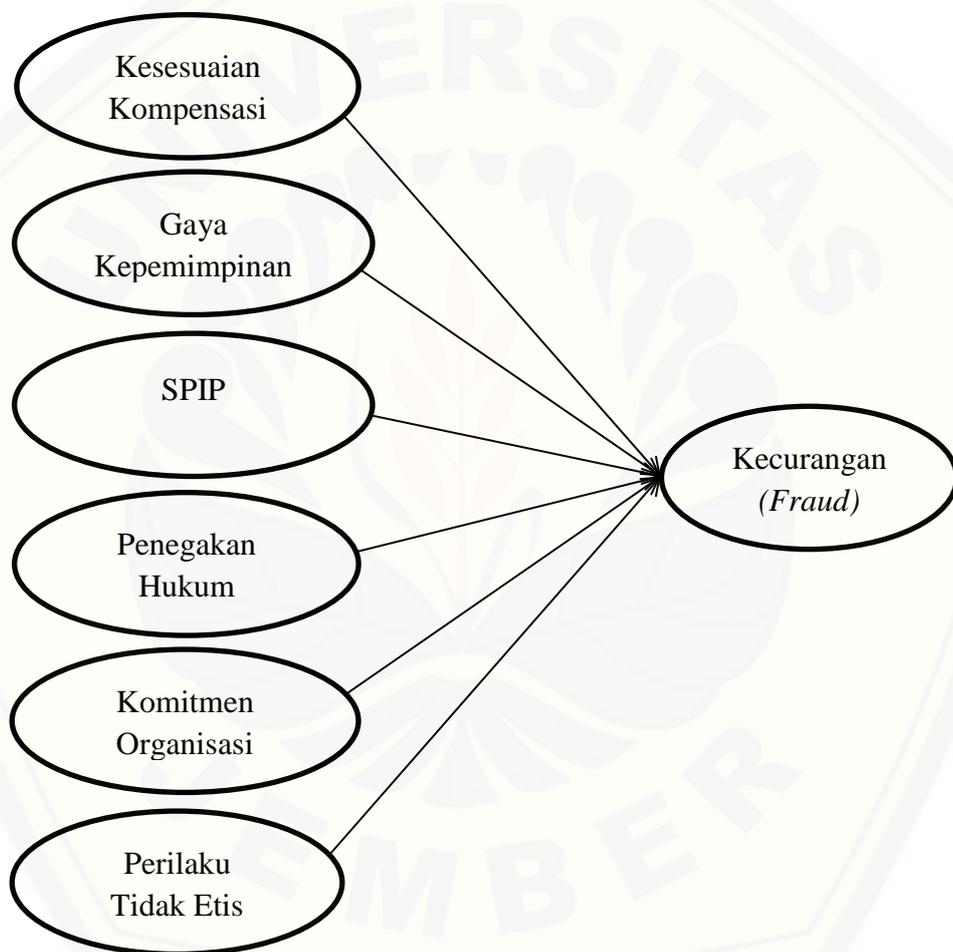
Perilaku tidak etis adalah suatu tindakan yang menyalahi etika yang dianut dalam suatu organisasi. Tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada sektor pemerintahan disebabkan oleh perilaku tidak etis yang dilakukan oleh manajemennya sendiri. Perilaku tidak etis yang biasanya dilakukan oleh manajemen diantaranya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, penyalahgunaan sumber daya organisasi serta perilaku tidak berbuat apa-apa.. Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Rachmanta dan Ikhsan (2014) terdapat pengaruh antara perilaku tidak etis terhadap kecurangan (*fraud*). Pada penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013) dan Ahriati (2015) juga menyatakan hasil yang sama yaitu terdapat pengaruh antara perilaku tidak etis terhadap

kecurangan (*fraud*). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi perilaku tidak etis yang dilakukan individu maka akan meningkatkan tindak kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan.

H₆ : Perilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Soepomo, 2014:23). Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2013:14) adalah metode penelitian sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan teknik sampel tertentu yang sesuai, pengumpulan data kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini terfokus pada kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), penegakan hukum, komitmen organisasi, dan perilaku tidak etis sebagai variabel independen terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Pemerintah Desa di Kabupaten Banyuwangi. Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang tersebar didesa-desa yang ada di kabupaten Banyuwangi.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Tempat penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kecenderungan *Fraud* di Pemerintah Desa dengan Pendekatan *Fraud Triangle* (Studi Empiris pada Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi)” ini terdiri dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Cluring yaitu Desa Plampangrejo, Desa Sarimulyo, Desa Tampo, Desa Sraten, Desa Kaliploso, Desa Sembulung, Desa Tamanagung, Desa Cluring, dan Desa Benculuk.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002:115) populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik

tertentu. Dapat disimpulkan bahwa populasi adalah obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang bekerja di seluruh Pemerintahan Desa Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Arikunto (2002:117) sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti. Dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel yang diambil terdiri dari 63 sampel antarlain: kepala desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur ekobang, kaur kesra, kaur keuangan, dan kaur umum. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang terdiri dari perangkat-perangkat desa yang memiliki kriteria memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang dibuat untuk tujuan penelitian. Data tersebut diperoleh secara langsung dari responden pada setiap desa yang berada di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dengan menyebarkan kuesioner kepada perangkat desa.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pernyataan tertulis (Indriantoro dan Soepomo, 2014: 152). Kuesioner adalah daftar pernyataan terstruktur yang diajukan kepada responden. Kuesioner diberikan kepada responden yang kemudian responden akan mengisinya sesuai dengan pendapat dan persepsi responden. Di dalam kuesioner telah diberikan penjelasan oleh peneliti terkait dengan tata cara pengisian kuesioner tersebut. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta

pendapatnya mengenai suatu pernyataan menggunakan skala Likert dengan penilaian dari 1 sampai 5. Penilaian dalam kuesioner sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabel Pengukuran Skala Likert

No	Kategori Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variable dependen (biasanya disebut variabel Y) adalah variabel yang keberadaanya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Sedangkan variabel independen (biasanya disebut variabel X) adalah variabel yang mempengaruhi keberadaan variabel dependen.

3.6.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah desa. Kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan adalah persepsi pegawai instansi pemerintahan mengenai kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintah desa.

BPK RI (2007) dalam Rachmawati (2014) menyatakan *fraud* sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tinggi pula frekuensi kecurangan yang terjadi. Variabel ini menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian karena dapat mendeteksi dan menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahan yang akan terjadi. Pengukuran ini memiliki 12 item pernyataan dengan menggunakan instrumen

yang dikembangkan oleh Mustikasari (2013) yang diukur menggunakan skala likert 1-5. Indikator kecurangan (*fraud*) diantaranya:

- a. Penyalahgunaan laporan keuangan
- b. Penyalahgunaan aset
- c. Korupsi

3.6.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini menjadi variabel independen adalah sebagai berikut:

a. Kesesuaian kompensasi

Menurut Panggabean (2004) mendefinisikan kompensasi sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Kesesuaian kompensasi merupakan tingkat kepuasan seorang karyawan terhadap sesuatu yang diterimanya berupa materiil maupun materiil sebagai imbalan atas kontribusi yang diberikan karyawan kepada organisasi tempat mereka bekerja. Pengukuran variabel kesesuaian kompensasi menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Wilopo (2006) dalam Mustikasari (2013) yang terdiri dari 5 item pernyataan dan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Indikator pengukuran kesesuaian kompensasi diantaranya:

- 1) Penyelesaian tugas
- 2) Pengakuan organisasi atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan
- 3) Promosi
- 4) Kompensasi keuangan
- 5) Pengembangan pribadi

b. Gaya kepemimpinan

Menurut Rivai (2010) mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mengarahkan bawahan agar bekerja sesuai dengan semestinya untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan akan menentukan kinerja karyawan. Pengukuran variabel gaya kepemimpinan

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Fiedler dalam Pramudita (2013) yang terdiri dari 5 item pernyataan dan diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Indikator pengukuran gaya kepemimpinan diantaranya:

- 1) Relasi pimpinan dengan bawahan
- 2) Delegasi Tugas
- 3) Struktur tugas
- 4) Etika pemimpin
- 5) Posisi kekuatan

c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin baik pengendalian internal suatu pemerintahan maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang terjadi. SPIP terdiri dari beberapa unsur:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Risiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pengukuran variabel sistem pengendalian internal pemerintah menggunakan instrumen yang berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang terdiri dari 7 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 1-5. Indikator pengukuran SPIP diantaranya:

- 1) Penilaian risiko
- 2) Aktivitas pengendalian
- 3) Pemantauan
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Lingkungan pengendalian

d. Penegakan Hukum

Hukum merupakan tatanan atau pedoman perilaku yang mengatur manusia yang bersifat memaksa. Agar hukum dapat berfungsi secara efektif maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Penegakan Hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Chaerudin, 2008). Pengukuran variabel penegakan hukum menggunakan instrumen yang dikembangkan dari penelitian Zulkarnain (2013) yang terdiri dari 6 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 1-5. Indikator pengukuran penegakan hukum diantaranya:

- 1) Adanya aturan hukum
- 2) Disiplin kerja
- 3) Tanggung jawab
- 4) Proses penegakan hukum
- 5) Ketaatan terhadap hukum

e. Komitmen organisasi

Robbins dan Judge (2007:110) dalam Rimata (2014) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seorang pegawai memihak kepada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi adalah rasa keinginan yang dimiliki pegawai untuk tetap mencurahkan tenaga dan pikirannya demi kelangsungan organisasi tempat ia bekerja. Pengukuran variabel komitmen organisasi menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Luthans (2006) dalam Mustikasari (2013) yang terdiri dari 6 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 1-5. Indikator komitmen organisasi diantaranya:

- 1) Kesamaan nilai

- 2) Gembira memilih bekerja pada organisasi
 - 3) Bekerja melalui target
 - 4) Menerima segala tugas
 - 5) Bangga menjadi bagian organisasi
 - 6) Peduli pada nasib organisasi
- f. Perilaku Tidak Etis

Perilaku tidak etis adalah perilaku menyimpang seseorang yang tidak sesuai dengan etika yang diterapkan dalam lingkungan sekitar. Seseorang yang melakukan perilaku tidak etis tersebut mengetahui bahwa perbuatannya menyimpang namun tetap melakukannya karena diperlukan pengorbanan pribadi untuk bertindak sesuai dengan etika. Pengukuran variabel perilaku tidak etis menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Wilopo (2006) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan menggunakan skala likert 1-5. Indikator perilaku tidak etis diantaranya:

- 1) Perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi
- 2) Perilaku manajemen yang mengabaikan suatu peraturan.
- 3) Perilaku manajemen yang menyalahkan kedudukan
- 4) Perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa

3.7 Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang membahas tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan cepat memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, nilai pemusatan, dan nilai penyebaran. Menurut Ghazali (2016) statistika deskriptif mendeskripsikan data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data

penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan dan tingkat keabsahan yang tinggi. Oleh sebab itu, kuesioner harus terlebih dahulu diuji keandalan dan keabsahannya.

a. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Menurut (Ghozali 2016:52) uji validitas digunakan untuk menguji sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dimana kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Konstruk dikatakan valid jika nilai Pearson Correlation $>0,5$ dan signifikan $<0,05$.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berfungsi sebagai alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan variabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah Cronbach's Alpha. Kriteria pengujian adalah jika koefisien alpha (α) $> 0,7$ maka instrumen yang digunakan dapat dikatakan reliabel. (Ghozali, 2016:47).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi linier berganda yaitu dengan uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji apakah dapat memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik

adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016:10). Dalam penelitian ini uji asumsi normalitas menggunakan analisis grafik dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, dan uji statistik dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov.

Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan untuk asumsi normalitas antarlain:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sedangkan dalam uji statistik Kolmogorov-Smirnov, penentuan normal atau tidaknya suatu distribusi data ditentukan berdasarkan taraf signifikansi hasil hitung. Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti ada data residual terdistribusi tidak normal.
- 2) Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen

sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam regresi pada penelitian ini, dapat dilihat nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas ketika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memiliki masalah multikolinieritas (Ghozali, 2016:103).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam pengujian ini adalah menggunakan grafik scatterplot.

Uji scatterplot yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPERD dengan residualnya SRESID. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada plot yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2016:134).

3.7.4 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Uji regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Mengingat penelitian ini menggunakan 6 variabel independen, maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

- Y = Kecurangan (*Fraud*)
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 X_1 = Kesesuaian Kompensasi
 X_2 = Gaya Kepemimpinan
 X_3 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 X_4 = Penegakan Hukum
 X_5 = Komitmen Organisasi
 X_6 = Perilaku Tidak Etis
e = Kesalahan regresi (error)

a. Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan pada analisis regresi. Uji F dilakukan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

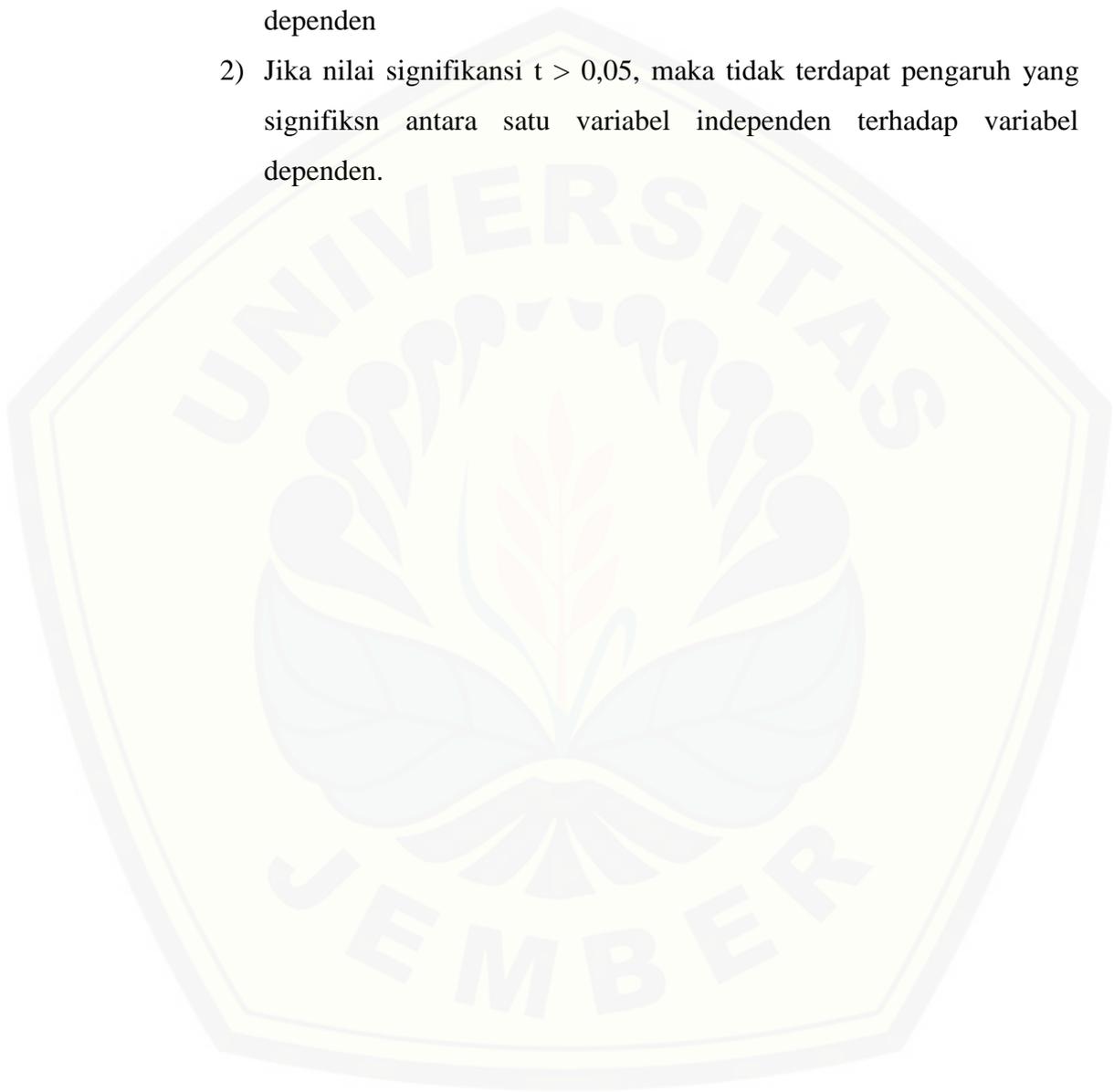
Pengujian R^2 digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Menurut Ghazali (2016:95) apabila R^2 sama dengan 0, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila R^2 semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen semakin kecil terhadap variabel dependen. Apabila R^2 semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Uji T

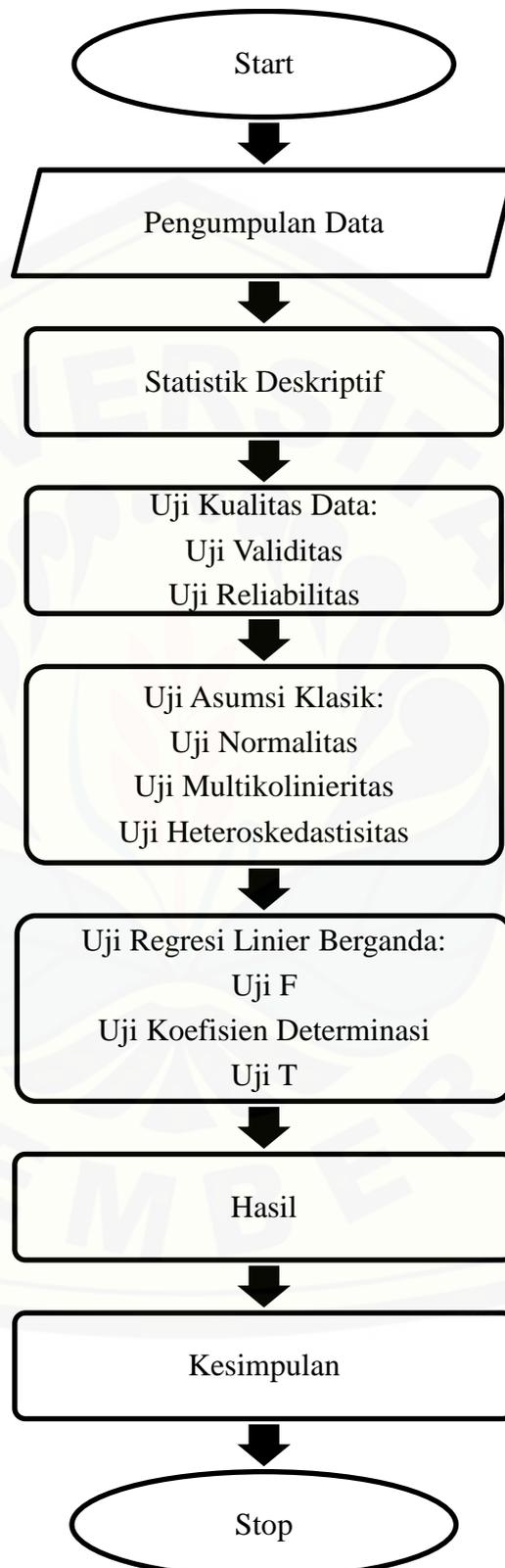
Menurut Ghazali (2016:99) menyatakan uji t dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y). Pengujian pada uji hipotesis secara

parsial ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen
- 2) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.



3.8 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.2 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kecenderungan *Fraud* di pemerintah desa yaitu kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan hukum, komitmen organisasi, dan perilaku tidak etis. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
2. Tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
3. Tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal pemerintah dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
4. Terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di kecamatan Cluring Kabupaten Jember.
5. Tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
6. Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa

berdasarkan persepsi perangkat desa yang ada di kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini.

Adapun keterbatasan tersebut yaitu:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada persepsi jawaban responden, belum mencakup pengukuran yang memadai untuk mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan desa. Hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya.
2. Penelitian ini menggunakan variabel yang telah diuji oleh peneliti sebelumnya, sehingga belum mencakup variabel lain yang mungkin berpengaruh.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun sarang tersebut antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa Cluring diharapkan untuk menyelesaikan proses penanganan pelanggaran hukum dalam instansi secara tegas dan tepat waktu agar dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan (*fraud*) di pemerintah desa yang mungkin dapat terjadi.
2. Diharapkan bagi Pemerintah Desa Cluring untuk meningkatkan perilaku etis dengan menerapkan sanksi yang tegas apabila karyawan berperilaku tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat mencegah dan mengurangi kecenderungan kecurangan (*fraud*) di pemerintah desa yang mungkin dapat terjadi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitiannya agar dapat menggeneralisasi hasil penelitian di wilayah yang lebih luas.

4. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pemerintahan desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelin, Vani. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi pada BUMN Kota Padang. *Jurnal 3*.
- Adinda, YM., S. Ikhsan. 2015. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Jurnal Analisis Akuntansi* 4(3):8-9.
- Agoes, S. 2017. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Buku 1 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahriati, D., P. Basuki., dan E. Widiastuty. 2015. Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal InFestasi* 11(1): 41-45
- Albrecht, W.S., C.C. Albrecht., dan C.D. Albrecht. 2006. *Fraud Examination*. Second Edition. Thomson South-Western.
- Ambarwati, N. 2015. Gaya Kepemimpinan yang Efektif dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT. Sumber Mas Indah Plywood. *Jurnal Mahasiswa*.
- Andriansyah, M. 2016. Pertumbuhan Ekonomi Terbaik, Banyuwangi raih GOVERNMENT Award. <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/pertumbuhan-ekonomi-terbaik-banyuwangi-raih-GOVERNMENT-award-2016.html>. [Diakses pada 3 Oktober 2017]
- Antara., Y. Pencawan. 2017. Tiap Desa akan Dapat 1 Miliar Tahun Depan. <http://sumatera.bisnis.com/m/read/20160925/50/64917/tiap-desa-akan-dapat-rp1-miliar-tahun-depan>. [Diakses pada 25 September 2017]
- Apriadi, Rangga Nur. 2013. *Determinan Terjadinya Fraud di Instansi Pemerintahan*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Arens, A.A., R.J. Elder dan M.S. Beasley. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Kelimabelas. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Keempat. Jakarta: Rineka Cipta.

- Belarminus, R., dan S, Asril. 2017. Kasus Suap Penanganan Korupsi Dana Desa, KPK Geledah Empat Lokasi di Pamekasan. <http://nasional.kompas.com/2017/08/04/18541911/kasus-suap-penanganan-korupsi-dana-desa-kpk-geledah-empat-lokasi-di>. [Diakses pada 9 September 2017].
- Chaerudin, S.A. Dinar, dan S. Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Darsono. 2001. Korupsi Sebagai Kompensasi Underpayment: Suatu Tinjauan Teori Equity. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 3(2):477
- Deni, S. 2017. Cegah Penyimpangan, Dekopin Usul Koperasi Salurkan Dana Desa. <http://m.liputan6.com/bisnis/read/3055529/cegah-penyimpangan-dekopin-usul-koperasi-salurkan-dana-desa>. [Diakses pada 9 September 2017].
- Downida, A.N. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kota Kediri. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(5).
- Fanani, Ardian. 2016. *Mantan Pejabat Pemkab Banyuwangi Ditahan Terkait Kasus Korupsi Bedah Rumah*. <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/3255960/mantan-pejabat-pemkab-banyuwangi-ditahan-terkait-kasus-korupsi-bedah-rumah>. [Diakses pada 10 September 2017].
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8 Cetakan Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadi, S. 2017. *Kepala Desa Ditahan Diduga Korupsi ADD 2016*. <https://www.google.co.id/amp/www.metrotvnews.com/amp/0KvG5AwN-kepala-desa-ditahan-diduga-korupsi-add-2016>. [Diakses pada 25 September 2017].
- Hasibuan dan Malayu, S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indriantoro, N., dan B, Soepomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Indonesia Corruption Watch. 2016. *In-Depth Analysis: Tren Korupsi 2016: Fenomena Munculnya Elite Capture*. <https://antikorupsi.org/news/depth-analysis-tren-korupsi-2016-fenomena-munculnya-lokal-elite-capture>. [Diakses pada 25 September 2017]

- Indonesia Corruption Watch. 2015-2016. Jumlah Kasus Korupsi. ICW: Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2003. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Kurniawan, Ardeno. 2014. *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kurrohman, T., Lailiyah, A., dan Wahyuni, N.I. 2017. Determinant of Fraudulent in GOVERNMENT: An Emprical Analysis in Situbondo Regency, East Java, Indonesia. *International Journal of Economics and Management* 11(S1):133-140.
- Messier., et.al. 2014. *Jasa Audit dan Assurance*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustikasari, D. P. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud* di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal* 2(3):257.
- Najahningrum. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Nurjanah. 2008. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi pada Biro Lingkup Departemen Pertanian). *Tesis*. Semarang: Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Pamungkas. 2016. Pengaruh Orientasi Etika dan Komitmen Profesional Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Melalui Rasionalisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18(01): 41-48.
- Panggabean, S., Mutiara.2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Patty, R.R. 2017. *Korupsi Dana Desa, Kepala Desa di Maluku Tengah Ditahan*. <http://regional.kompas.com/read/2017/08/09/17374471/korupsi-dana-desa-kepala-desa-di-maluku-tengah-ditahan>. [Diakses pada 25 September 2017].
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2014. *Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013*. Banyuwangi.

- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2015. *Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014*. Banyuwangi.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2016. *Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015*. Banyuwangi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 28 Agustus 2008: Jakarta.
- Pramudita, Aditya. 2013. Analisis *Fraud* di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal* 2(1): 36-43.
- Putro, YHS. 2009. Praktik Kecurangan Dalam Perusahaan. *Artikel*. Malang: Fakultas Ekonomi Malik Ibrahim
- Rachmanta, R., S, Ikhsan. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pendidikan Kota Semarang. *Jurnal Analisis Akuntansi* 3(3): 387-397.
- Rachmawati, K.K. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor dalam Perspektif *Fraud Triangle* Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rahman. 2011. Korupsi Di Tingkat Desa. *Governance* 2(1):14-24
- Ramdhana. 2015. Persepsi Pegawai Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*) di SKPD Kebumen. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rimata. 2014. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rivai, V. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada`
- Shintadevi. 2015. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel *Intervening*. *Jurnal Nominal* 4(2): 111-125.
- Smith, S.S. 2015. *3 Ways Accountants Can Use Big Data to Fight Fraud*. <https://www.accountingweb.com.com/practice/practice-excellence/3-ways->

- [accountant-can-be-use-big-data-to-fight-fraud](#). [Diakses pada 10 September 2017].
- Soekanto, S. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudibyo. 2016. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Mendeteksi Risiko *Fraud* di PT. Kaltim Industrial Estate. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Snata Dharma.
- Sudrajat, Tedi. 2010. Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa. *Jurnal Dinamika Hukum* 10(3): 293-300.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tashandra, N. 2016. *Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak di* 2015. <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/24/17553841/Jawa.Timur.Jadi.Provinsi.dengan.Kasus.Korupsi.Terbanyak.di.2015>. [Diakses pada 25 September 2017].
- Thoha, Miftah. 2007. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Tempo. 2012. *Korupsi 10 PNS Banyuwangi Dipecat*. <https://nasional.tempo.co/read/402690/korupsi-10-pns-banyuwangi-dipecat>. [Diakses pada 10 September 2017].
- Tuannakota, T.M. 2017. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Ventura, B. 2017. *Ini Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Peringkat 90*. <https://ekbis.sindonews.com/read/1174166/35/ini-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-90-1485344785>. [Diakses pada 5 September 2017].
- Wafa, W. *Dana Desa Makan Korban, Dua Kepala Desa di Bintang Ditahan*. <http://batam.tribunnews.com/2017/08/15/breakingnews-dana-desa-makan>

[korban-dua-kepala-desa-di-bintan-ditahan](#). [Diakses pada 25 September 2017].

Widiutami. 2017. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 7(01).

Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Kasus pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

_____. 2008. Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi di Pemerintah Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Ventura* 11(1).

Wulandari, S., dan A, Zaki. 2014. *Determinan Terjadinya Fraud di Instansi Pemerintahan (persepsi pada pegawai BPK RI Perwakilan NTB)*. Universitas Brawijaya Malang.

Zilmi. 2013. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada SKPD Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Zulkarnain. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Se-Kota Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.



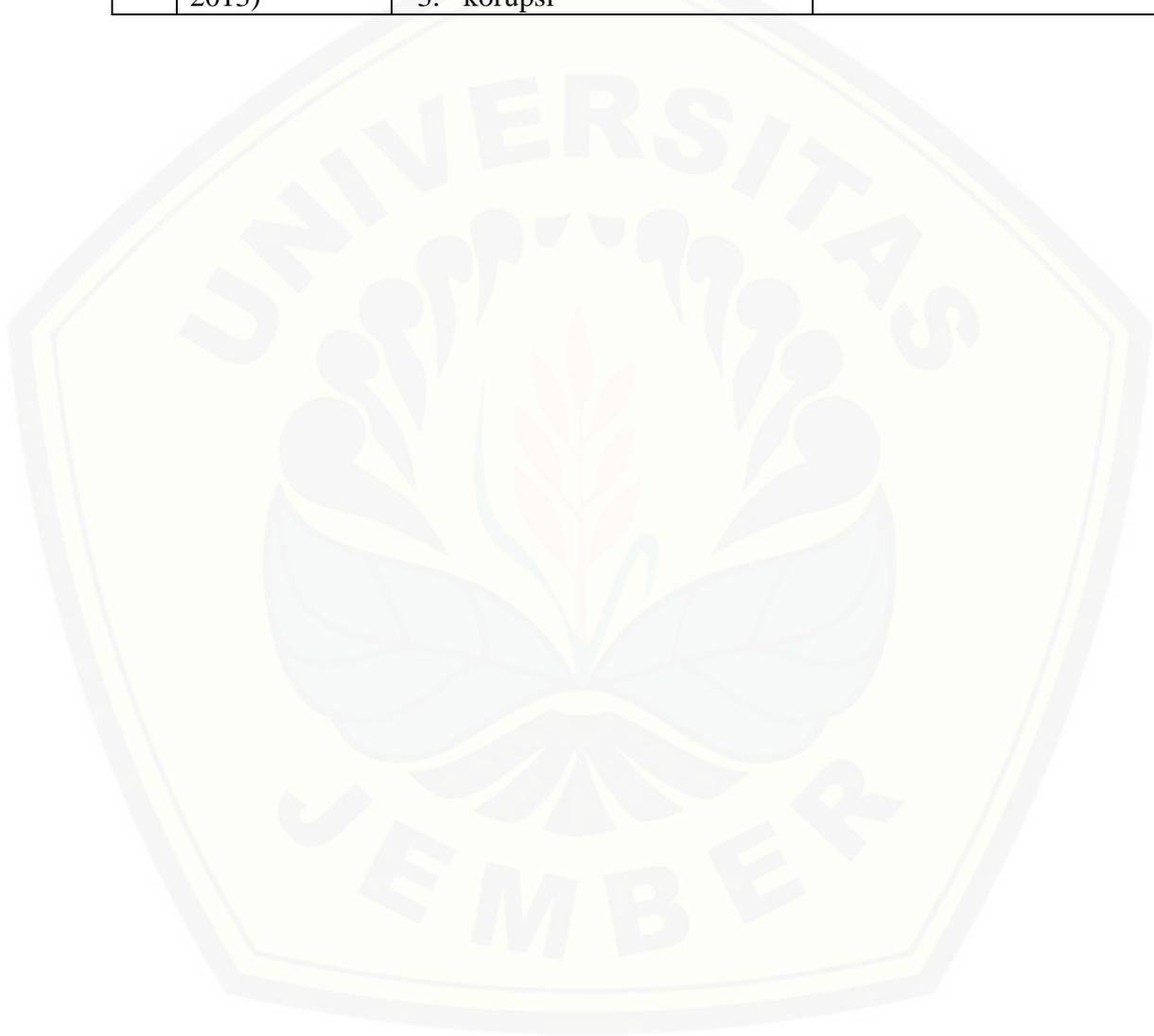
LAMPIRAN

Lampiran 1

Kisi-kisi Instrumen

No	Variabel	Indikator	Pernyataan Nomor
1	Kesesuaian Kompensasi (Wilopo 2006) dalam Mustikasari (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Tugas 2. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan 3. Promosi 4. Kompensasi keuangan 5. Pengembangan pribadi 	1,2,3,4, dan 5
2	Gaya Kepemimpinan (Fiedler dalam Pramudita 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relasi pimpinan dengan bawahan 2. Delegasi Tugas 3. Struktur Tugas 4. Etika Pemimpin 5. Posisi Kekuatan 	6,7,8,9, dan 10
3	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (PP No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern 	11,12,13,14,15,16, dan 17
4	Penegakan Hukum (Zulkarnain 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Aturan Hukum 2. Disiplin Kerja 3. Tanggung Jawab 4. Proses Penegakan Hukum 5. Ketaatan Terhadap Hukum 	18,19,20,21,22, dan 23
5	Komitmen Organisasi (Luthans 2006 dalam Mustikasari (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesamaan Nilai 2. Gembira memilih bekerja pada organisasi 3. Bekerja melalui target 4. Menerima segala tugas 5. Bangga menjadi bagian organisasi 6. Peduli pada nasib organisasi 	24,25,26,27,28, dan 29
6	Perilaku Tidak Etis (Wilopo 2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi 2. Perilaku manajemen yang mengabaikan suatu peraturan 	30,31,32, dan 33

		<ol style="list-style-type: none">3. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan4. Perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa	
7	Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Mustikasari 2013)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyalahgunaan Laporan Keuangan2. Penyalahgunaan Aset3. korupsi	34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,dan 45



Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth`

Bapak/Ibu/Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arin Diah Nawang Palupi

NIM : 140810301092

Prodi : akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian berikut. Berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jember dengan judul “**Analisis Kecenderungan *Fraud* di Pemerintah Desa dengan Pendekatan *Fraud Triangle* (Studi Empiris di Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi)**”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Oleh karena itu, dimohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. **Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.**

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,



Arin Diah Nawang Palupi

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Umur :
Jabatan :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Lama Jabatan :
Pendidikan Terakhir :

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi didalam instansi saudara. Tidak ada pernyataan benar atau salah. Saudara mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Saudara setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi tanda *checklist* (√) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut:

Penilaian:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

No	Kesesuaian Kompensasi	SS	S	N	TS	STS
1	Intansi ini dikelola oleh manajemen sedemikian sehingga para pegawainya dapat menyelesaikan tugas dengan baik					
2	Seluruh pegawai di instansi ini menguasai pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawabnya masing-masing					
3	Promosi di instansi ini diberikan apabila pegawai telah mencapai prestasi kerja					
4	Kompensasi keuangan yang instansi berikan diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah saya lakukan					
5	Di instansi ini, saya dapat memaksimalkan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian di bidangnya					

No	Gaya Kepemimpinan	SS	S	N	TS	STS
6	Di instansi tempat saya bekerja, relasi antara pimpinan dan bawahan sangat baik dan pimpinan mengakui serta menghargai bawahan					
7	Di instansi tempa saya bekerja, pemimpin memberikan inspirasi kepada bawahan untuk memberikan kontribusi lebih pada tugas pokoknya					
8	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin menentukan tujuan yang realistis untuk instansi					
9	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin memberi pujian dan penghargaan					

	pada pegawai yang berprestasi					
10	Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin menyampaikan dengan jelas tentang tujuan yang diinginkan kepada bawahan					

No	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	SS	S	N	TS	STS
11	Di instansi tempat saya bekerja, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab sudah jelas					
12	Di instansi tempat saya bekerja, terdapat penilaian terhadap risiko					
13	Di instansi tempat saya bekerja, telah diterapkan pemisahan kewajiban dengan tepat					
14	Di instansi tempat saya bekerja, pengawasan dilakukan secara periodik					
15	Di instansi tempat saya bekerja, seluruh informasi mengenai kegiatan operasional instansi dicatat dalam sistem akuntansi					
16	Di instansi tempat saya bekerja, sistem informasi berfungsi dengan baik					
17	Di instansi tempat saya bekerja, peraturan untuk pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi seperti kas, persediaan, dan lain-lain telah ditetapkan					

No	Penegakan Hukum	SS	S	N	TS	STS
18	Di instansi tempat saya					

	bekerja, terdapat aturan-aturan hukum yang berlaku					
19	Di instansi tempat saya bekerja, seluruh pegawai datang dan pulang tepat waktu					
20	Di instansi tempat saya bekerja, seluruh pegawai bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing					
21	Di instansi tempat saya bekerja, para pejabat tanggap apabila terjadi pelanggaran peraturan					
22	Di instansi tempat saya bekerja, jika terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku					
23	Di instansi tempat saya bekerja, seluruh pegawai patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan					

No	Komitmen Organisasi	SS	S	N	TS	STS
24	Prinsip nilai kinerja saya sejalan dengan prinsip nilai kinerja instansi ini					
25	Saya lebih memilih untuk bergabung dengan instansi ini sebagai tempat saya bekerja daripada instansi lainnya					
26	Di instansi tempat saya bekerja, pegawai bersedia lembur demi kepentingan instansi					
27	Saya menerima segala penugasan tugas agar tetap bisa bekerja di instansi ini					
28	Saya bangga memperkenalkan instansi ini kepada orang lain					

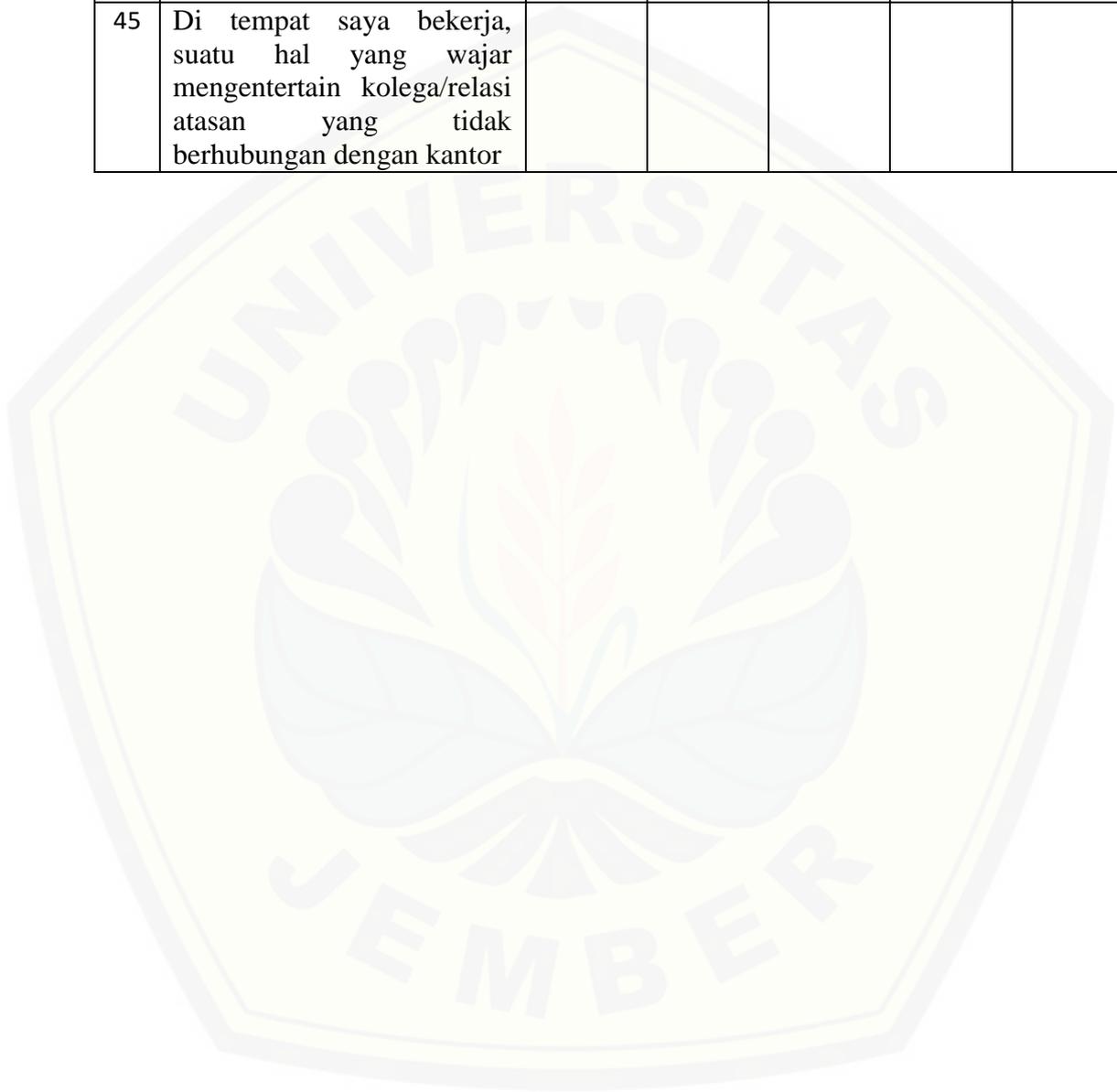
29	Saya sangat peduli terhadap nasib instansi ini					
----	--	--	--	--	--	--

No	Perilaku Tidak Etis	SS	S	N	TS	STS
30	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila menggunakan kendaraan atau peralatan kantor untuk kepentingan pribadi					
31	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila pegawai mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan					
32	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila pegawai yang memiliki kedudukan tinggi menyalahgunakan kekuasaannya					
33	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar bila pegawai tidak melakukan pekerjaan apapun dimana pegawai tersebut sedang banyak tugas					

No	Kecenderungan Kecurangan	SS	S	N	TS	STS
34	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila biaya dicatat lebih besar dari semestinya untuk suatu tujuan tertentu					
35	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila menggunakan uang instansi tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang untuk kepentingan pribadi					
36	Di instansi tempat saya					

	bekerja, suatu hal yang wajar apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja peralatan gedung kantor					
37	Di tempat saya bekerja, sesuatu hal yang wajar apabila para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor					
38	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja peralatan gedung kantor					
39	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila ditemukan adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung					
40	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila sisa anggaran diberikan kepada pegawai sebagai bonus					
41	Di instansi saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang					
42	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila meminjam uang di bank untuk keperluan pribadi dengan atas nama instansi					
43	Di instansi tempat saya bekerja, atasan memerintah mengambil sebagian uang untuk keperluan pribadi teman-teman kantor					

44	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila menggunakan sebagian uang kantor untuk mengikuti gaya hidup sesama teman kantor					
45	Di tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar mengentertain kolega/relasi atasan yang tidak berhubungan dengan kantor					



Lampiran 3

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	45	15,00	25,00	21,1333	2,15955
X2	45	15,00	25,00	21,2444	2,24778
X3	45	24,00	35,00	28,7556	2,99360
X4	45	21,00	30,00	25,3333	2,14264
X5	45	22,00	30,00	25,8444	2,71323
X6	45	4,00	10,00	7,1333	1,90215
Y	45	12,00	34,00	21,2444	4,14595
Valid N (listwise)	45				

Keterangan:

X₁ = Kesesuaian Kompensasi

X₂ = Gaya Kepemimpinan

X₃ = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

X₄ = Penegakan Hukum

X₅ = Komitmen Organisasi

X₆ = Perilaku Tidak Etis

Y = Kecurangan (*Fraud*)

Lampiran 4

UJI KUALITAS DATA

Uji Validitas

Kesesuaian Kompensasi

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,605**	,810**	,513**	,280	,853**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,062	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X1.2	Pearson Correlation	,605**	1	,548**	,429**	,297*	,766**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,003	,048	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X1.3	Pearson Correlation	,810**	,548**	1	,488**	,322*	,840**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,031	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X1.4	Pearson Correlation	,513**	,429**	,488**	1	,347*	,707**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,001		,020	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X1.5	Pearson Correlation	,280	,297*	,322*	,347*	1	,609**
	Sig. (2-tailed)	,062	,048	,031	,020		,000
	N	45	45	45	45	45	45
X1	Pearson Correlation	,853**	,766**	,840**	,707**	,609**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Gaya Kepemimpinan

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,662**	,647**	,444**	,285	,858**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,002	,057	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X2.2	Pearson Correlation	,662**	1	,514**	,351*	,145	,733**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,018	,342	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X2.3	Pearson Correlation	,647**	,514**	1	,457**	,168	,768**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,002	,270	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X2.4	Pearson Correlation	,444**	,351*	,457**	1	,236	,692**
	Sig. (2-tailed)	,002	,018	,002		,118	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X2.5	Pearson Correlation	,285	,145	,168	,236	1	,527**
	Sig. (2-tailed)	,057	,342	,270	,118		,000
	N	45	45	45	45	45	45
X2	Pearson Correlation	,858**	,733**	,768**	,692**	,527**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,179	,229	,529**	,341*	,709**	,347*	,648**
	Sig. (2-tailed)		,238	,130	,000	,022	,000	,019	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
X3.2	Pearson Correlation	,179	1	-,005	,306*	,618**	,269	,304*	,649**
	Sig. (2-tailed)	,238		,972	,041	,000	,074	,042	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
X3.3	Pearson Correlation	,229	-,005	1	,398**	,418**	,392**	,332*	,559**
	Sig. (2-tailed)	,130	,972		,007	,004	,008	,026	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
X3.4	Pearson Correlation	,529**	,306*	,398**	1	,239	,538**	,482**	,682**
	Sig. (2-tailed)	,000	,041	,007		,113	,000	,001	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
X3.5	Pearson Correlation	,341*	,618**	,418**	,239	1	,347*	,159	,747**
	Sig. (2-tailed)	,022	,000	,004	,113		,020	,296	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
X3.6	Pearson Correlation	,709**	,269	,392**	,538**	,347*	1	,685**	,774**
	Sig. (2-tailed)	,000	,074	,008	,000	,020		,000	,000

	N	45	45	45	45	45	45	45	45
	Pearson Correlation	,347*	,304*	,332*	,482**	,159	,685**	1	,648**
X3.7	Sig. (2-tailed)	,019	,042	,026	,001	,296	,000		,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45
	Pearson Correlation	,648**	,649**	,559**	,682**	,747**	,774**	,648**	1
X3	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	45	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Penegakan Hukum

Correlations

	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4	
X4.1	Pearson	1	,549**	,680**	,414**	,245	,246	,741**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,005	,104	,103	,000
X4.2	N	45	45	45	45	45	45	45
	Pearson	,549**	1	,491**	,466**	,257	,424**	,752**
	Correlation							
X4.3	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,001	,001	,089	,004	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
	Pearson	,680**	,491**	1	,483**	,274	,476**	,790**
X4.4	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,001	,001	,069	,001	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X4.5	Pearson	,414**	,466**	,483**	1	,544**	,509**	,760**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,005	,001	,001		,000	,000	,000
X4.6	N	45	45	45	45	45	45	45
	Pearson	,245	,257	,274	,544**	1	,292	,610**
	Correlation							
X4.5	Sig. (2-tailed)	,104	,089	,069	,000		,052	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
	Pearson	,246	,424**	,476**	,509**	,292	1	,665**
X4.6	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,103	,004	,001	,000	,052		,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X4	Pearson	,741**	,752**	,790**	,760**	,610**	,665**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Komitmen Organisasi

Correlations

	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5	
X5.1	Pearson Correlation	1	,548**	,417**	,316*	,405**	,461**	,732**
	Sig. (2-tailed)		,000	,004	,035	,006	,001	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X5.2	Pearson Correlation	,548**	1	,464**	,333*	,414**	,456**	,748**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,025	,005	,002	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X5.3	Pearson Correlation	,417**	,464**	1	,194	,657**	,222	,710**
	Sig. (2-tailed)	,004	,001		,201	,000	,143	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X5.4	Pearson Correlation	,316*	,333*	,194	1	,120	,098	,598**
	Sig. (2-tailed)	,035	,025	,201		,433	,524	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X5.5	Pearson Correlation	,405**	,414**	,657**	,120	1	,285	,693**
	Sig. (2-tailed)	,006	,005	,000	,433		,058	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X5.6	Pearson Correlation	,461**	,456**	,222	,098	,285	1	,582**
	Sig. (2-tailed)	,001	,002	,143	,524	,058		,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X5	Pearson Correlation	,732**	,748**	,710**	,598**	,693**	,582**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Perilaku Tidak Etis

Correlations

	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6	
X6.1	Pearson Correlation	1	,545**	,292	,212	,712**
	Sig. (2-tailed)		,000	,052	,162	,000
	N	45	45	45	45	45
X6.2	Pearson Correlation	,545**	1	,557**	,315*	,762**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,035	,000
	N	45	45	45	45	45
X6.3	Pearson Correlation	,292	,557**	1	,530**	,755**
	Sig. (2-tailed)	,052	,000		,000	,000
	N	45	45	45	45	45
X6.4	Pearson Correlation	,212	,315*	,530**	1	,736**
	Sig. (2-tailed)	,162	,035	,000		,000
	N	45	45	45	45	45
X6	Pearson Correlation	,712**	,762**	,755**	,736**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kecenderungan Kecurangan

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	Y1.11	Y1.12	Y
Y1.1	Pearson Correlation	1	,651**	,542**	,334*	,344*	,548**	,352*	,196	,511**	,561**	,626**	,240	,761**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,025	,021	,000	,018	,197	,000	,000	,000	,113	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.2	Pearson Correlation	,651**	1	,516**	,554**	,264	,357*	,274	,150	,513**	,560**	,531**	,186	,719**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,080	,016	,069	,327	,000	,000	,000	,221	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.3	Pearson Correlation	,542**	,516**	1	,323*	,295*	,221	,275	,081	,542**	,432**	,334*	,102	,597**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,031	,049	,144	,067	,596	,000	,003	,025	,505	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.4	Pearson Correlation	,334*	,554**	,323*	1	,252	,276	,139	,292	,374*	,410**	,340*	,243	,600**
	Sig. (2-tailed)	,025	,000	,031		,095	,067	,363	,052	,011	,005	,023	,108	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Y1.5	Pearson Correlation	,344*	,264	,295*	,252	1	,542**	,276	,504**	,276	,166	,055	,354*	,531**
	Sig. (2-tailed)	,021	,080	,049	,095		,000	,067	,000	,067	,276	,720	,017	,000

Y1.6	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	Pearson Correlation	,548**	,357*	,221	,276	,542**	1	,556**	,549**	,119	,433**	,541**	,523**	,737**
	Sig. (2-tailed)	,000	,016	,144	,067	,000		,000	,000	,436	,003	,000	,000	,000
Y1.7	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	Pearson Correlation	,352*	,274	,275	,139	,276	,556**	1	,615**	,210	,380*	,370*	,322*	,630**
	Sig. (2-tailed)	,018	,069	,067	,363	,067	,000		,000	,166	,010	,012	,031	,000
Y1.8	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	Pearson Correlation	,196	,150	,081	,292	,504**	,549**	,615**	1	,175	,240	,074	,384**	,547**
	Sig. (2-tailed)	,197	,327	,596	,052	,000	,000	,000		,250	,112	,630	,009	,000
Y1.9	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	Pearson Correlation	,511**	,513**	,542**	,374*	,276	,119	,210	,175	1	,282	,322*	,143	,576**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,011	,067	,436	,166	,250		,060	,031	,349	,000
Y1.10	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	Pearson Correlation	,561**	,560**	,432**	,410**	,166	,433**	,380*	,240	,282	1	,788**	,203	,728**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,005	,276	,003	,010	,112	,060		,000	,181	,000
Y1.11	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	Pearson Correlation	,626**	,531**	,334*	,340*	,055	,541**	,370*	,074	,322*	,788**	1	,334*	,716**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,025	,023	,720	,000	,012	,630	,031	,000		,025	,000

Y1.12	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Pearson Correlation	,240	,186	,102	,243	,354*	,523**	,322*	,384**	,143	,203	,334*	1
	Sig. (2-tailed)	,113	,221	,505	,108	,017	,000	,031	,009	,349	,181	,025	,000
Y	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Pearson Correlation	,761**	,719**	,597**	,600**	,531**	,737**	,630**	,547**	,576**	,728**	,716**	,526**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Variabel Kesesuaian Kompensasi

Case Processing Summary

		N	%
Valid		45	100,0
Cases Excluded ^a		0	,0
Total		45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,808	,812	5

Variabel Gaya Kepemimpinan

Case Processing Summary

		N	%
Valid		45	100,0
Cases Excluded ^a		0	,0
Total		45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,760	,762	5

Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,781	,806	7

Variabel Penegakan Hukum

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,803	,815	6

Variabel Komitmen Organisasi

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,722	,771	6

Variabel Perilaku Tidak Etis

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,689	,734	4

Variabel Kecenderungan Kecurangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	45	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

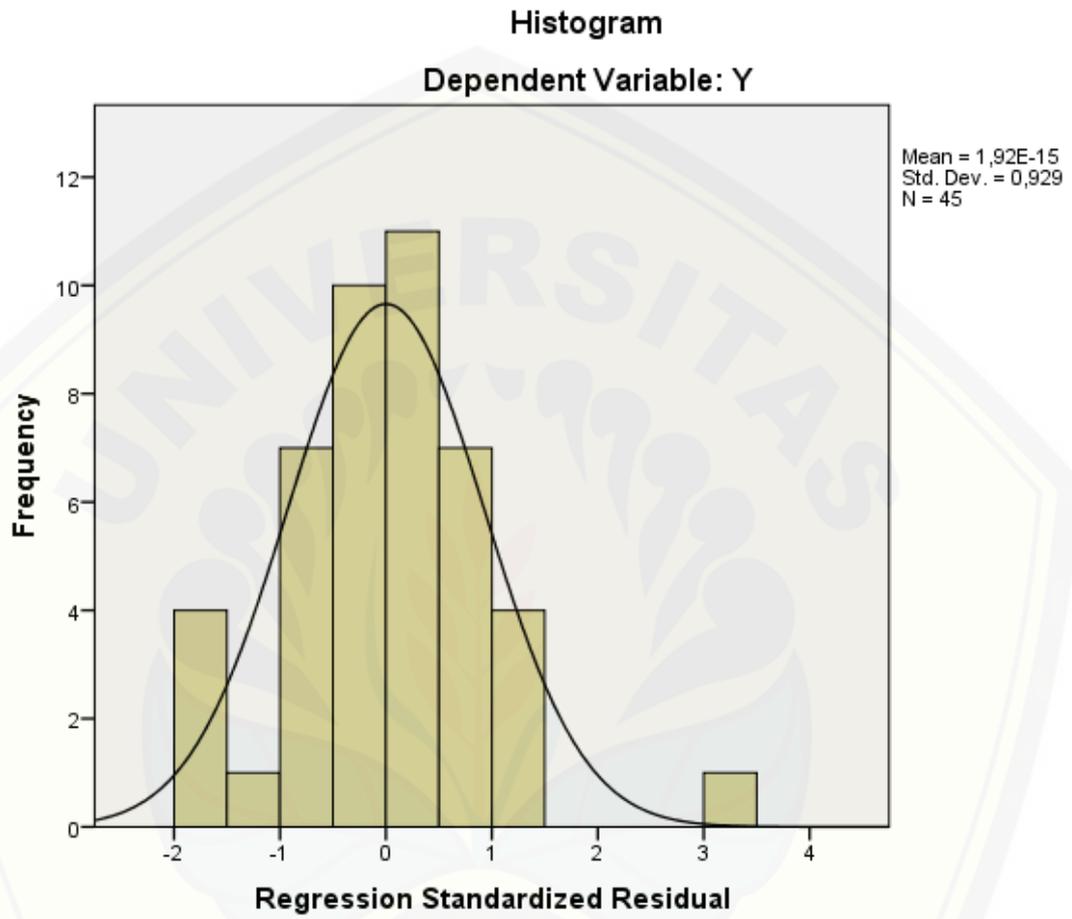
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,866	,869	12

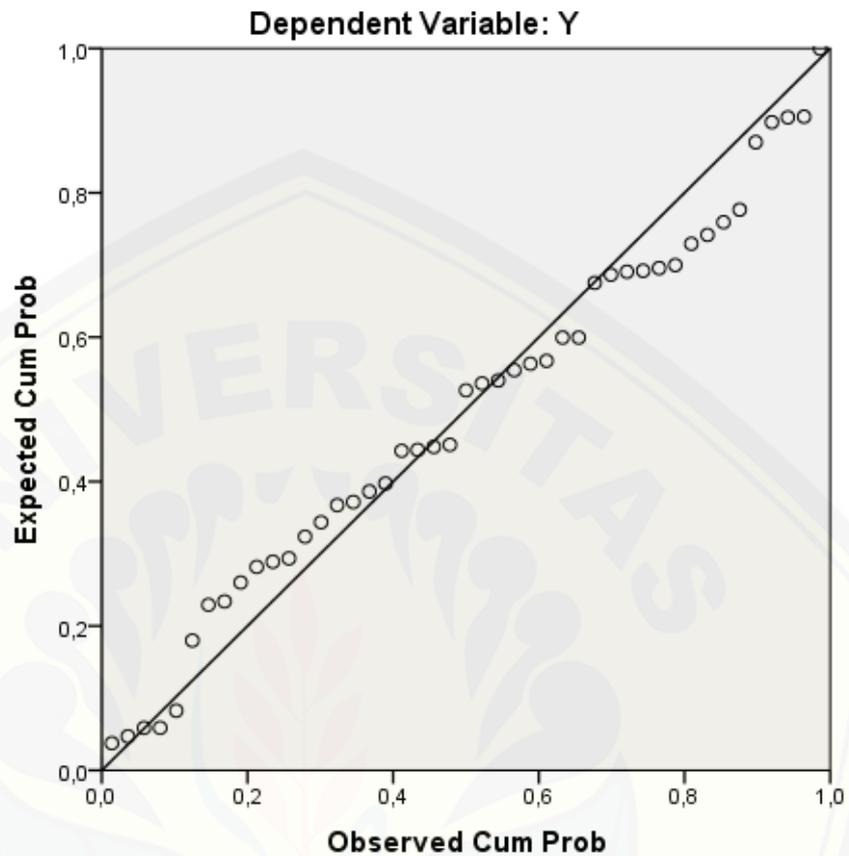
Lampiran 5

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas Data



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,21993130
	Absolute	,095
Most Extreme Differences	Positive	,095
	Negative	-,079
Kolmogorov-Smirnov Z		,640
Asymp. Sig. (2-tailed)		,808

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

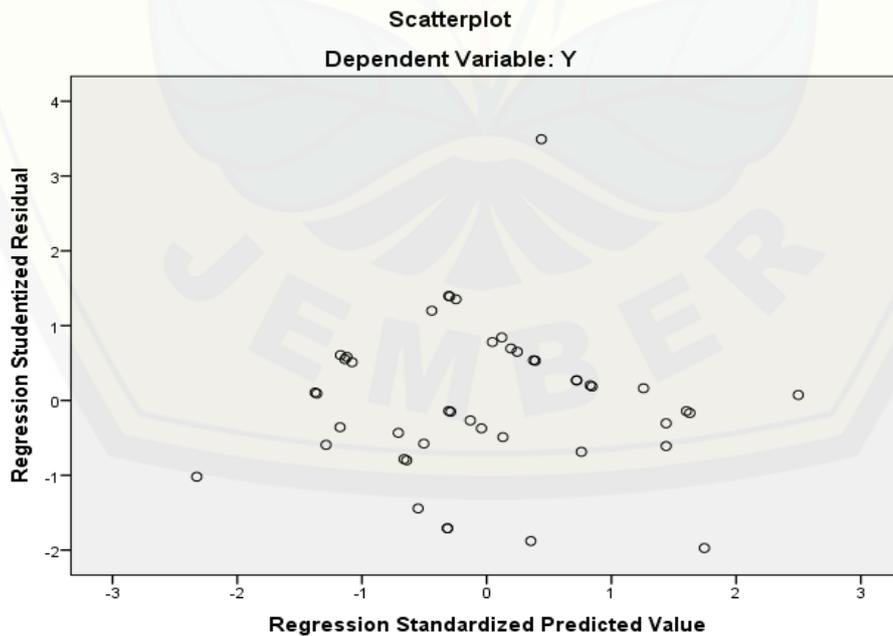
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	39,606	8,192		4,834	,000		
X1	-,150	,255	-,078	-,587	,561	,897	1,114
X2	-,132	,285	-,071	-,463	,646	,667	1,500
X3	,506	,344	,365	1,469	,150	,257	3,894
X4	-1,217	,446	-,629	2,728	,010	,299	3,348
X5	-,088	,330	-,058	-,268	,790	,341	2,933
X6	,865	,289	,397	2,993	,005	,903	1,107

a. Dependent Variable: Y

Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	39,606	8,192		4,834	,000
X1	-,150	,255	-,078	-,587	,561
X2	-,132	,285	-,071	-,463	,646
X3	,506	,344	,365	1,469	,150
X4	-1,217	,446	-,629	-2,728	,010
X5	-,088	,330	-,058	-,268	,790
X6	,865	,289	,397	2,993	,005

a. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	300,121	6	50,020	4,167	,003 ^b
	Residual	456,190	38	12,005		
	Total	756,311	44			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X6, X1, X2, X3, X5, X4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,630 ^a	,397	,302	3,46482

a. Predictors: (Constant), X6, X1, X2, X3, X5, X4

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 7

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

Variabel Kesesuaian Kompensasi

No.	Pernyataan					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	5	4	5	4	4	<u>22</u>
2	4	3	4	4	4	<u>19</u>
3	4	4	4	4	4	<u>20</u>
4	4	4	4	4	4	<u>20</u>
5	4	4	4	4	4	<u>20</u>
6	4	3	3	4	3	<u>17</u>
7	4	4	4	4	4	<u>20</u>
8	4	4	4	4	4	<u>20</u>
9	4	4	4	4	4	<u>20</u>
10	5	5	4	4	3	<u>21</u>
11	5	5	4	4	3	<u>21</u>
12	4	5	4	4	4	<u>21</u>
13	4	5	4	4	4	<u>21</u>
14	4	4	4	4	4	<u>20</u>
15	5	4	5	4	4	<u>22</u>
16	5	4	5	4	4	<u>22</u>
17	4	4	5	4	2	<u>19</u>
18	5	4	5	4	4	<u>22</u>
19	5	5	5	5	5	<u>25</u>
20	5	5	5	4	4	<u>23</u>
21	5	5	5	5	5	<u>25</u>
22	5	4	4	4	5	<u>22</u>
23	4	4	4	4	4	<u>20</u>
24	4	4	4	4	4	<u>20</u>
25	4	4	4	4	5	<u>21</u>
26	4	4	4	4	4	<u>20</u>
27	4	4	4	4	4	<u>20</u>
28	4	4	4	4	4	<u>20</u>
29	5	5	5	5	5	<u>25</u>
30	5	4	5	4	4	<u>22</u>
31	4	4	4	4	4	<u>20</u>

32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	3	4	19
34	4	3	4	4	4	19
35	5	4	5	5	4	23
36	4	4	4	4	5	21
37	5	5	5	4	4	23
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	5	5	5	25
40	4	4	4	4	4	20
41	5	4	5	4	5	23
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	5	5	5	25
44	5	5	5	3	5	23
45	2	3	3	3	4	15

Variabel Gaya Kepemimpinan

No	Pernyataan					jumlah
	1	2	3	4	5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	5	4	21
4	5	5	5	5	5	25
5	5	4	4	3	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	4	4	4	3	4	19
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	5	21
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	3	5	23
14	4	4	4	4	5	21
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	3	3	4	18
17	2	3	3	3	4	15
18	5	5	4	3	5	22
19	2	3	3	3	4	15
20	5	4	5	5	4	23
21	4	4	4	4	4	20

13	5	3	4	4	5	5	4	<u>30</u>
14	4	3	4	4	4	4	4	<u>27</u>
15	4	4	4	4	4	4	4	<u>28</u>
16	4	4	3	3	4	4	4	<u>26</u>
17	5	3	4	4	4	4	3	<u>27</u>
18	5	4	4	5	4	4	4	<u>30</u>
19	5	3	4	4	4	4	3	<u>27</u>
20	5	2	5	5	2	5	5	<u>29</u>
21	4	2	4	4	2	4	4	<u>24</u>
22	4	2	4	4	2	4	4	<u>24</u>
23	4	4	3	4	3	3	4	<u>25</u>
24	4	2	4	4	2	4	4	<u>24</u>
25	4	3	4	4	3	4	4	<u>26</u>
26	4	2	4	4	2	4	4	<u>24</u>
27	4	3	4	3	3	4	4	<u>25</u>
28	4	3	4	3	3	4	4	<u>25</u>
29	5	4	4	4	4	5	5	<u>31</u>
30	5	4	4	4	4	5	5	<u>31</u>
31	4	3	4	4	4	4	4	<u>27</u>
32	4	4	4	4	4	4	4	<u>28</u>
33	4	4	5	5	4	5	5	<u>32</u>
34	4	4	5	4	4	4	5	<u>30</u>
35	5	5	2	5	2	5	5	<u>29</u>
36	4	4	4	4	4	4	4	<u>28</u>
37	4	3	4	4	3	4	4	<u>26</u>
38	5	5	5	5	5	5	4	<u>34</u>
39	5	4	4	5	5	5	5	<u>33</u>
40	4	4	4	4	4	4	4	<u>28</u>
41	5	4	4	4	4	5	5	<u>31</u>
42	4	5	4	4	4	4	4	<u>29</u>
43	5	4	5	5	5	5	5	<u>34</u>
44	5	3	4	4	4	5	5	<u>30</u>
45	5	3	4	4	4	4	3	<u>27</u>

39	5	5	5	4	4	4	<u>27</u>
40	5	4	4	4	4	4	<u>25</u>
41	5	5	4	4	4	4	<u>26</u>
42	4	4	4	4	4	4	<u>24</u>
43	5	5	5	5	5	5	<u>30</u>
44	5	5	5	4	4	4	<u>27</u>
45	3	4	4	4	4	4	<u>23</u>

Variabel Komitmen Organisasi

No	Pernyataan 5						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	5	4	4	<u>28</u>
2	5	5	5	5	5	5	<u>30</u>
3	5	4	4	2	4	4	<u>23</u>
4	5	5	5	5	5	5	<u>30</u>
5	5	4	4	5	5	4	<u>27</u>
6	5	4	3	4	4	5	<u>25</u>
7	5	5	4	4	4	4	<u>26</u>
8	4	4	5	4	4	4	<u>25</u>
9	5	5	4	4	4	4	<u>26</u>
10	5	5	4	4	4	4	<u>26</u>
11	5	5	4	4	4	4	<u>26</u>
12	5	5	5	5	5	5	<u>30</u>
13	5	5	5	3	5	4	<u>27</u>
14	4	4	4	4	4	4	<u>24</u>
15	5	5	5	5	5	5	<u>30</u>
16	5	4	4	4	3	4	<u>24</u>
17	4	4	4	4	4	2	<u>22</u>
18	5	4	4	4	4	4	<u>25</u>
19	3	4	4	4	4	3	<u>22</u>
20	5	5	5	2	5	5	<u>27</u>
21	4	4	4	2	4	4	<u>22</u>
22	4	4	4	2	4	4	<u>22</u>
23	4	4	3	4	3	4	<u>22</u>
24	4	4	4	2	4	4	<u>22</u>
25	4	4	4	4	3	4	<u>23</u>
26	4	4	4	2	4	4	<u>22</u>
27	5	4	4	5	4	4	<u>26</u>
28	5	4	4	5	4	4	<u>26</u>
29	5	5	5	4	5	4	<u>28</u>

30	5	5	5	4	5	4	<u>28</u>
31	5	4	4	4	4	4	<u>25</u>
32	4	5	4	5	5	4	<u>27</u>
33	5	5	4	5	5	4	<u>28</u>
34	4	5	2	4	2	5	<u>22</u>
35	5	5	5	2	5	5	<u>27</u>
36	5	5	4	4	4	4	<u>26</u>
37	4	4	4	4	3	4	<u>23</u>
38	5	5	5	5	5	5	<u>30</u>
39	5	5	5	5	4	4	<u>28</u>
40	5	5	5	5	5	5	<u>30</u>
41	5	5	5	5	4	4	<u>28</u>
42	5	5	4	4	4	4	<u>26</u>
43	5	5	5	5	5	5	<u>30</u>
44	5	5	5	5	3	4	<u>27</u>
45	4	4	4	4	4	2	<u>22</u>

Variabel Perilaku Tidak Etis

No	Pernyataan 6				Jumlah
	1	2	3	4	
1	2	1	1	2	<u>6</u>
2	2	2	2	2	<u>8</u>
3	2	2	2	4	<u>10</u>
4	2	2	2	2	<u>8</u>
5	2	2	1	1	<u>6</u>
6	2	2	1	2	<u>7</u>
7	1	1	1	1	<u>4</u>
8	1	1	1	1	<u>4</u>
9	1	1	1	1	<u>4</u>
10	1	1	1	1	<u>4</u>
11	3	2	2	3	<u>10</u>
12	1	1	1	1	<u>4</u>
13	2	1	1	1	<u>5</u>
14	2	2	1	1	<u>6</u>
15	4	2	2	2	<u>10</u>
16	2	1	1	2	<u>6</u>
17	2	2	2	2	<u>8</u>
18	2	2	1	1	<u>6</u>
19	2	2	2	2	<u>8</u>
20	2	2	2	2	<u>8</u>

21	2	2	2	2	<u>8</u>
22	2	2	2	2	<u>8</u>
23	3	2	2	3	<u>10</u>
24	2	2	2	2	<u>8</u>
25	2	2	2	2	<u>8</u>
26	2	2	2	2	<u>8</u>
27	4	2	1	1	<u>8</u>
28	4	2	1	1	<u>8</u>
29	2	2	1	2	<u>7</u>
30	2	2	1	2	<u>7</u>
31	2	2	1	4	<u>9</u>
32	2	1	1	1	<u>5</u>
33	1	1	1	1	<u>4</u>
34	2	1	2	4	<u>9</u>
35	2	2	2	2	<u>8</u>
36	3	3	2	2	<u>10</u>
37	2	2	2	2	<u>8</u>
38	2	2	2	2	<u>8</u>
39	2	2	1	1	<u>6</u>
40	4	2	2	2	<u>10</u>
41	2	2	2	1	<u>7</u>
42	1	1	1	1	<u>4</u>
43	2	2	2	2	<u>8</u>
44	2	1	1	1	<u>5</u>
45	2	2	2	2	<u>8</u>

Variabel Kecenderungan Kecurangan

No	Pernyataan												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	<u>17</u>
2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	<u>20</u>
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	<u>24</u>
4	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	<u>20</u>
5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	<u>15</u>
6	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	<u>21</u>
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	<u>24</u>
8	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	<u>16</u>
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	<u>25</u>
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	<u>25</u>
11	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1	3	<u>23</u>
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<u>12</u>
13	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	<u>18</u>
14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	<u>24</u>
15	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	<u>24</u>
16	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2	<u>16</u>
17	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	<u>25</u>
18	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	<u>18</u>
19	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	<u>25</u>
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	<u>24</u>

